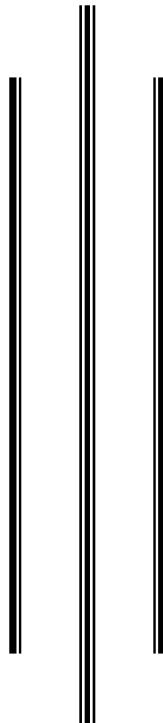




**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/ 44 /XI/REN.2.3./2024

Tentang

RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
 3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
 7. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Renstra Polda Sumbar Tahun 2020-2024.

Memperhatikan.....



2 KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/ 44 /XI/REN.2.3./2024
TANGGAL: 29 NOVEMBER 2024

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/415/XI/2024 tanggal 4 Oktober 2024 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2025;
2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025.

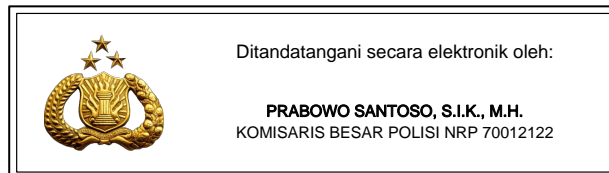
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.**

1. Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 29 November 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BERLAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	31
2. Identifikasi Masalah	32
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	
a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar.....	33
b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar.....	33
4. Tujuan	33
a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2025	33
b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025	34
5. Sasaran Prioritas Tahun 2025	34
a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar	34
b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar.....	34
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2025	35
7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025...	50
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2025	
8. Program dan Kegiatan	57
9. Pagu Indikatif	58
V. PENUTUP	
10. Penutup	58
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RKT	
2. RKA – K/L (Pagu Indikatif T.A. 2025)	



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2025 merupakan Tahun pertama dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2025-2029 dan sebagai kelanjutan dari pertahapan Rencana strategis T.A. 2020-2024. Rencana Kerja T.A. 2025 disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Polda Sumbar T.A. 2025.

Itwasda Polda Sumbar telah menunjukkan keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan telah terlaksananya Operasi Kepolisian di Jajaran Polda Sumbar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, terlaksananya kegiatan verifikasi yang dapat melihat pelaksanaan-pelaksanaan tugas pokok dan fungsi para Kasatker dan Kapolres/Ta sejajaran Polda Sumbar, terlaksananya kegiatan Audit Kinerja sehingga telah mewujudkan laporan Satker dan Satwil sejajaran Polda Sumbar yang dapat dipertanggungjawabkan, menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atas perilaku anggota Polri khususnya Polda Sumbar dilapangan serta mewujudkan pelayanan maksimal terhadap setiap pengaduan dari Masyarakat, menurunnya pelanggaran atau kesalahan administrasi.

Keberhasilan yang diraih diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga Itwasda Polda Sumbar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat memastikan bahwa mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan tugas Itwasda Polda Sumbar sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat terus meningkatkan Kualitas Pengawasan, meningkatkan Akuntabilitas, meningkatkan Efisiensi, dan meningkatkan Efektivitas sehingga Level kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat ditingkatkan.

Adapun Level kapabilitas APIP terbagi menjadi 5 level, yaitu sebagai berikut:

- a. Level 1 (*Initial*) adalah APIP masih dalam tahap awal pengembangan, belum memiliki sistem dan prosedur yang terstruktur;
- b. Level 2 (*Infrastructure*) adalah APIP telah memiliki struktur organisasi dan sistem dasar, namun belum terintegrasi dengan baik;
- c. Level 3 (*Integrated*) adalah APIP telah memiliki sistem yang terintegrasi dan proses pengawasan yang terdokumentasi;

- d. Level 4 (*Managed*) adalah APIP telah mengelola risiko dan kinerja secara proaktif, serta memiliki sistem manajemen mutu;
- e. Level 5 (*Optimizing*) adalah APIP telah mencapai tingkat kematangan tertinggi, dengan inovasi dan perbaikan terus-menerus.

Tantangan dalam meningkatkan Level kapabilitas APIP akan dapat terwujud dengan beberapa faktor antara lain:

- a. Komitmen Pimpinan: Dukungan penuh dari pimpinan instansi sangat penting untuk pengembangan APIP;
- b. Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten;
- c. Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan APIP;
- d. Sistem Informasi: Penggunaan sistem informasi yang mendukung proses pengawasan;
- e. Kerjasama dengan Pihak Lain: Kerjasama dengan pihak terkait, seperti BPKP, auditor eksternal, dan pihak manajemen.

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) Audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) Reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) Evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;
- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Perubahan isu-isu pada lingkungan strategis global seperti: demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban.



Selanjutnya perkembangan lingkungan strategis nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renja Itwasda Poldasumbar T.A. 2025.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal di wilayah hukum Poldasumbar Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Geografi

- a) Provinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, Provinsi Sumatera barat terletak disebelah barat pulau Sumatera.
- b) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng Indo australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain: retakan/patahan disepanjang pulau Sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan retakan/patahan Mentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai (bagian barat Kep. Mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia / zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dgn kecepatan ± 7 cm / Tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Merapi di daerah Bukittinggi/Tanah Datar dan dan Gunung Talang di wilayah Kabupaten Solok), sehingga Sumbar merupakan daerah rawan bencana Gempa bumi berupa gunung meletus maupun gempa bumi tektonik yang berpotensi timbulnya tsunami.
- c) Sumatera Barat Wilayah Sumatera Barat merupakan jalur perlintasan yang menghubungkan antar Provinsi di pulau Sumatera melalui jalur darat dan berbatasan secara langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu yang mobilitasnya sangat padat dan rentan terjadinya konflik perbatasan, konflik sosial, konflik agraria perkebunan, tambang, penyelundupan dan kriminalitas lainnya.



- d) Wilayah Sumatera Barat yang memiliki luas lebih kurang 42.297,30 km berupa daratan dan lautan terdiri dari 391 Pulau pulau kecil dan besar yang berhadapan dengan samudera Hindia yang merupakan perlintasan jalur ekonomi internasional yang rentan terjadinya gangguan kamtibmas (penyelundupan, terorisme, pencurian ikan, illegal logging, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya).
- e) Sumatera Barat mempunyai 19 Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Mentawai memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,21% luas Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil yaitu 23,0 Km2 atau 0,05% dari luas provinsi Sumbar.
- f) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km2 atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.
- g) Sumatera Barat juga memiliki empat danau yang indah yaitu danau singkarak, danau diatas dan danau dibawah terletak di Kabupaten Solok, danau maninjau terletak di Kabupaten Agam serta terdapat gugusan gunung yang hampir diseluruh Kabupaten / kota gunung yang paling tinggi adalah gunung Talamau di kabupaten Pasaman Barat dengan ketinggian lk 2.913 meter dari permukaan laut serta adanya gunung yang aktif masing-masing Gunung Merapi di wilayah Kab/Kota Padang Panjang/Tanah Datar, Gunung Talang terletak di Kabupaten Solok.
- h) Alam Sumatera Barat meliputi kawasan lindung yang mencapai sekitar 45,17% dari luas keseluruhannya, sedangkan lahan yang sudah dimanfaatkan untuk budidaya baru tercatat sebesar 23.19,11 Km2 atau sekitar 54,83% dari kawasan seluruhnya.

2) Demografi

- a) Jumlah penduduk Sumbar berdasarkan Tahun 2023 sebanyak 5.640.629 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.841.802 jiwa dan perempuan sebanyak 2.798.827 jiwa, Menurut kabupaten dan kota jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kota Padang 919.145 jiwa sedangkan Kota Padang Panjang merupakan daerah yang paling sedikit penduduknya 57.850 jiwa, Kota yang terpadat penduduknya adalah Bukittinggi yaitu mencapai 5.102 jiwa/ km2, sedangkan kabupaten yang terjarang penduduknya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai, hanya 15 jiwa/km2.

b) Tinjau



- b) Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat Tahun 2023 rata-rata 132/KM2, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi hampir 4.941/Km2 dan penduduk terjarang adalah Kab. Kepulauan Mentawai yaitu 14,46 orang per Km2. Penduduk Sumbar Mayoritas terdiri dari suku Minangkabau, sedangkan dalam jumlah kecil terdiri suku Jawa, Batak, Aceh, Melayu, Nias, Cina.
- c) Penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepiritual Masyarakat. Namun keberadaan agama lainnya tetap memperoleh tempat untuk berkembang. Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.
- d) Pertambahan penduduk di Sumatera Barat setiap Tahun sekitar 1 s/d 2% dengan penyebarannya yang tidak merata serta terjadinya peningkatan angkatan kerja sedangkan lapangan kerja sangat terbatas/tidak seimbang sehingga terjadinya kepadatan penduduk di beberapa wilayah di Sumbar, makin tingginya pengangguran dan kemiskinan sehingga rentan terjadinya gangguan kamtibmas.
- e) Provinsi Sumatera Barat juga merupakan wilayah yang didiami oleh penduduk yang heterogen dari berbagai macam agama dengan prosentase pemeluk agama Tahun 2023:
 - 1) Agama Islam sebanyak 97,6 %
 - 2) Agama Protestan sebanyak 1,5 %
 - 3) Agama Khatolik sebanyak 0,84 %
 - 4) Agama Hindu sebanyak 0,0056 %
 - 5) Agama Budha sebanyak 0,84 %
 - 6) Agama lainnya sekitar 0,0158 %

3) Sumber Daya Alam

- a) Sumber Daya Alam di Provinsi Sumatera Barat sebagai penghasil Devisa Negara relatif kecil dibandingkan dengan provinsi lain disektor pertanian adalah Cacao, Cengkeh, kelapa sawit ,gambir, kulit manis, disektor industri adalah semen padang, kondisi tersebut disamping jumlahnya relatif kecil dan belum tereksplorasi sepenuhnya dikarenakan belum adanya Sumber Daya Manusia yang mumpuni, disamping adanya indikasi investor asing takut masuk ke Sumbar dikarenakan adanya polemik dan masalah pembebasan tanah yang cukup rumit dan sulit, sehingga memberatkan para investor itu sendiri bila akan menanamkan sahamnya ke Wilayah Sumbar.



- b) Sumber daya alam lainnya yang potensial dikembangkan di wilayah Sumatera Barat adalah kelautan, Perikanan, keindahan alam pesisir pantai dan laut seperti di Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat sedangkan Kepulauan Mentawai berupa keindahan Pantai dan Keindahan alam bawah laut, untuk kegiatan menyelam dan berenang, surfing/peselancar serta pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk wisata.
- c) Masyarakat Sumatera Barat memiliki budaya yang khas serta memiliki keindahan alam yang mengagumkan sehingga dikenal sebagai daerah tujuan wisata baik lokal, nasional maupun mancanegara. Kota Bukittinggi merupakan suatu daerah yang beriklim sejuk dikelilingi oleh gunung-gunung dengan nagari-nagari tradisional serta tatanan kehidupan yang masih bertahan selama berabad-abad, Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi dengan mempunyai ciri khas masakan Padang yang terkenal sampai ke Mancanegara, sehingga setiap orang yang pernah berkunjung ke Sumbar selalu terkesan dan tidak mudah melupakan keindahannya.
- d) Sebagai dampak lingkungan terhadap pengelolaan Sumber daya alam yang tidak dikelola secara profesional dan provosional menyebabkan terjadinya bebarapa pelanggaran hukum seperti *illegal meaning*, *illegal logging*, *illegal phising* /pencurian ikan dapat berdampak negatif, disamping rusaknya ekosistem yang ada disekitar lokasi, terjadinya hutan gundul yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana alam banjir/tanah longsor yang merugikan masyarakat setempat maupun kerugian negara.
- e) Kekayaan alam khususnya kelautan memiliki potensi ikan sebagai penghasil Devisa negara namun dengan terbatasnya sumber daya manusia yang kurang handal sehingga potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- f) Luas hutan di wilayah Sumatera Barat menunjukkan semakin terjadinya penurunan setiap Tahunnya akibat adanya alih fungsi baik secara resmi yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan adanya pemekaran wilayah dengan perubahan RT/RW atau dengan secara illegal yang dilakukan masyarakat setempat untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan dari data Tahun 2019 hutan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat sbb:
- | | | |
|-----|------------------------------|--------------|
| (1) | Hutan lindung seluas | : 923.246 Ha |
| (2) | Hutan Suaka alam dan wisata | : 773.434 Ha |
| (3) | Hutan Produksi terbatas | : 216.233 Ha |
| (4) | Hutan Produktip tetap seluas | : 429.281 Ha |



4) Ideologi

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa wilayah Indonesia termasuk aliran radikal yang baru-baru ini muncul yaitu ISIS (*Islamic state of Irak and Syria*) yang menginginkan perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah yang berkedok Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila sebagai azas negara di Indonesia, Kelompok Islam radikal ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat.
- b) Pengaruh situasi global dari negara barat saat ini, dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi termasuk organisasi yang akan menghidupkan kembali paham ideologi komunis, di Sumbar sejak Tahun 2012 (di Kota Padang, Bukittinggi, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Tanah Datar, Kab. Solok dan Padang Panjang) telah menemukan organisasi /kelompok /aktivis yang tergabung dalam YPKP (Yayasan Penelitian Korban Peristiwa) 1965 /1966 dan pada Tahun 2015 pada saat DPP YPKP Sdr. Bejo Untung akan melakukan pelantikan salah satu ketua DPC YPKP Kota Bukittinggi di Bukittinggi mendapat protes keras dari masyarakat Kota Bukittinggi sehingga rencana pelantikan PDC YPKP Bukittinggi batal dilaksanakan karena di protes oleh masyarakat sekitar.

5) Politik

- a) Kondisi Politik secara Nasional masih dihadapkan pada upaya untuk melanjutkan reformasi disegenap aspek kehidupan nasional dengan bertumpu pada prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila yang telah ditetapkan sebagai dasar negara. Hasil pembangunan politik dirasakan masih kurang antara lain tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga politik semakin merosot karena makin banyak elite politik yang terjerat kasus korupsi dan tidak ada keteladanan serta eforia yang kebablasan yang mengakibatkan norma-norma hukum dan kepatutan yang berlaku dimasyarakat dilerlanggar.
- b) Munculnya kelompok-kelompok baru yang tidak puas dengan sistem politik dan kehidupan partai politik sekarang ini mereka berobsesi menciptakan sistem politik baru dengan menolak format politik yang berlaku sekarang, kelompok ini biasanya berada di level akar rumput mengagregasi kepentingan rakyat yang paling



riil yang mudah diartikulasikan menjadi isu politik dengan arah gerakannya adalah sebagai berikut :

- (1) Mendelegitimasi partai dan sistem politik sekarang melalui isukorupsi.
 - (2) Memobilisasi massa dan melakukan tekanan ekstra parlementer.
 - (3) Memasuki gelanggang politik dengan mengkampanyekan calon independen ataupun partai politik lokal.
- c) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai nilai Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat namun realitanya demokrasi liberal lebih menonjol dalam sistem proses pengambilan keputusan yakni melalui mekanisme voting yang berlaku dari pusat sampai ke tingkat daerah.
- d) Struktur Politik saat ini masih menghadapi berbagai tuntutan masyarakat antara lain :
- (1) Masih banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara maupun pejabat tingkat daerah sehingga terkesan bahwa para pejabat belum bisa dijadikan panutan/contoh teladan bagi masyarakat luas.
 - (2) Pelayanan publik yang dianggap masyarakat belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab pekerjaan pada instansi /lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadi pelanggaran hukum / korupsi hampir disemua instansi pemerintah baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah.
 - (3) Perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah pusat maupun pimpinan daerah disamping Sistem Multi partai saat ini belum sepenuhnya mampu menghasilkan pemerintah yang kuat karena di negara Indonesia tidak menganut sistem oposisi yang mengontrol dan mengkritisi kebijaksanaan pemerintah.
 - (4) Proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan nasional masih didominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol melalui wakil rakyat dan elite politik yang berada di kursi pemerintah, musyawarah untuk mufakat yang merupakan amanat pembukaan UUD 1945 tidak



terimplementasi secara konsisten ini terlihat dari dominasi peran fraksi dari pada peran wakil rakyat pengambilan keputusan lebih cenderung menggunakan model Voting.

- e) Budaya politik dalam berdemokrasi kondisinya belum menunjukkan iklim dan budaya politik yang benar, budaya politik masih bersifat parokial, primordial, oportunistis, nepotis feodal dan anarkis indikatornya antara lain masih adanya pengerahan kekuatan massa politik sebagai kelompok penekan yang bernuansa kekerasan dan destruktif.
- f) Budaya paternalistik masih kuat pengaruhnya pada konteks pemilihan kepemimpinan etika politik belum sepenuhnya mempedomani prinsip-prinsip demokrasi hal ini terlihat banyaknya pemaksaan kehendak dan adanya kelompok yang tidak siap kalah dalam pertarungan politik. Figur kharismatik masih menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan partai.
- g) Kebebasan Pers sangat dinamis dan belum diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik sehingga mengarah kepada kebebasan tanpa batas dan tidak tanggung jawab serta cenderung mengabaikan etika terhadap berbagai pemberitaan, Media masa masih mengutamakan kepentingan keuntungan bisnis dibandingkan dengan resiko sosial politik.
- h) Sistem hukum nasional belum berjalan maksimal yang meliputi substansi hukum, kelembagaan, sarana dan prasarana dan budaya hukum sebagai akibat dari pembangunan hukum yang belum selesai secara tuntas, Perumusan perundang-undang belum sepenuhnya berorientasi kepada kepentingan masyarakat umum disebabkan sebagian penyusun undang-undang lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat dari pada kepentingan nasional.
- i) Penegakan hukum masih dihadapkan belum optimalnya kinerja aparat penegak hukum, selain itu masih terjadi mafia peradilan dan diskriminasi dalam penerapan hukum faktor lain yang dapat menghambat penegakan hukum disebabkan integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- j) Jumlah Nagari di Wilayah Sumbar Tahun 2023 sebanyak 1.228 nagari yang merupakan Pemerintah terendah dibawah Kecamatan ternyata belum mempunyai batas wilayah secara



hukum akan tetapi batas ditentukan menurut hukum adat setempat sehingga hal ini merupakan kerawanan dimasa yang akan datang yakni terjadinya permasalahan konflik sosial berupa kasus keagrariaan/pertanahan, batas wilayah, pertambangan dan masalah perkebunan.

- k) Partisipasi masyarakat untuk memilih calon Legislatif mulai dari DPRD Kab/Kota, Provinsi dan DPR RI serta DPD RI sangat tinggi, karena pelaksanaanya di lakukan serentak dengan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI, dari pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2014 yang mencapai 71%, sementara pada pelaksanaan Pilpres Tahun 2019 di Sumbar mencapai 79,6 %. Namun pada permilihan Gubernur/Wakil Gubernur terjadi penurunan partisipasi masyarakat yaitu dengan menjadi hanya 65,42 %.
- l) Suhu Politik secara Nasional pasca dilaksanakan pesta Demokrasi Pileg dan Pilpres 2019 relatif aman dan kondusif serta situasi Politik pasca pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020 baik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di wilayah Sumbar pada umumnya dalam keadaan relatif aman walaupun terjadi gejolak politik secara nasional namun di Sumbar masih tetap bisa terkendali serta menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 situasi saat ini telah membawa beberapa perubahan besar dari dinamika politik yang ada, diantaranya munculnya partai - partai baru untuk menjadi peserta konstetasi politik di Tahun 2024, munculnya serta pergerakan dari beberapa Tokoh Nasional/Pejabat yang di gadang-gadang menjadi pasangan Presiden 2024.
- m) Isu-isu kebijakan pemerintah yang kontroversi serta problematika lama yang belum tuntas di masyarakat yaitu transparansi RUU KHUP, RUU Omnibuslaw, Pembangunan IKN.
- n) Suhu Politik wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 diperkirakan akan menegang menjelang pelaksanaan pemilu serentak Tahun 2024, dikarenakan dengan telah dimulainya rangkaian tahapan pileg, Pilpres, dan pemilihan kepala Daerah Tahun 2024.
- o) Jadwal Pemilu Serentak Tahun 2024 untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta anggota DPD RI akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sedangkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Wali



Kota dan Wakil Walikota akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

p) Telah berlangsung beberapa rangkaian tahapan Pemilu serentak Tahun 2024 yaitu saat ini sedang berlangsung tahap Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta penetapan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu 2024 diantaranya :

- (1) Nomor Urut 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- (2) Nomor Urut 2 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- (3) Nomor Urut 3 PDI Perjuangan
- (4) Nomor Urut 4 Partai Golongan Karya (Golkar)
- (5) Nomor Urut 5 Partai NasDem
- (6) Nomor Urut 6 Partai Buruh
- (7) Nomor Urut 7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
- (8) Nomor Urut 8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
- (9) Nomor Urut 9 Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
- (10) Nomor Urut 10 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
- (11) Nomor Urut 12 Partai Amanat Nasional (PAN)
- (12) Nomor Urut 13 Partai Bulan Bintang (PBB)
- (13) Nomor Urut 14 Partai Demokrat
- (14) Nomor Urut 15 Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
- (15) Nomor Urut 16 Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
- (16) Nomor Urut 17 Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- (17) Nomor Urut 24 Partai Ummat

q) Data pasangan calon Presiden /Wakil Presiden serta Partai politik Pengusung dan Pendukung calon Presiden/Wapres pada Pemilu 2024 :

- (1) Nomor Urut 1 H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph. D dan Dr. (H.C.) Drs. H. Abdul Muhaimin Iskandar, M. Si dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) total 167 kursi.
- (2) Nomor urut 2 Letnan Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dan Gibran Rakabuming Raka dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) total 261 kursi
- (3) Nomor Urut 3 H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P dan Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P, total 147 kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (128 Kursi DPR RI).

r) De



r) Daftar Calon Tetap anggota DPD RI Dapil Sumbar

NO URUT	NAMA	KET
1	H. Abdul Aziz, SP., M.M.	
2	Cerint Iralloza Tasya, S. Ked.	
3	Desrio Putra	
4	Dirri Uzhzhulam, (ELOK).	
5	Hj. Emma Yohanna	
6	Ir. H. Hendra Irwan Rahim, M.M.	
7	H. Jelita Donal, Lc.	
8	Drs. Jhoni Afrizal, DT. HITAM.	
NO URUT	NAMA	KET
9	H. Leonardy Harmainy, DT. Bandaro Basa, S.IP., M.H.	
10	Mevrizal, S.H., M.H.	
11	H. Muslim M Yatim, Lc., M.M.	
12	Nurkhalis, S.H.	
13	Yonder WF Alvarent	
14	Yong Hendri, S.H, DT. Paduko Reno.	
15	Hj. Yuri Hadiah, S.H.	

s) Berdasarkan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan jumlah 243 orang yang terdiri dari 18 partai Nasional dengan rincian :

NO	PARPOL	DAPIL I	DAPIL II	JUMLAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	8	6	14
2	Partai Gerindra	8	6	14
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8	6	14
4	Partai Golongan Karya	8	6	14
5	Partai Nasional Demokrat	8	6	14
6	Partai Buruh	8	6	14
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7	3	10
8	Partai Keadilan Sejahtera	8	6	14
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	4	10
10	Partai Hanura	8	6	14
11	Partai Garda Republik Indonesia	8	6	14
12	Partai Amanat Nasional	8	6	14
13	Partai Bulan Bintang	7	6	13
14	Partai Demokrat	8	6	14
15	Partai Solidaritas Indonesia	8	6	14
16	Partai Perindo	8	6	14
17	Partai Persatuan Pembangunan	8	6	14
18	Partai Ummat	8	6	14
JUMLAH		140	103	243



t) Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi Sumbar berdasarkan Partai Politik

NO URUT	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	JUMLAH DCT		TOTAL
		L	P	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	46	19	65
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	45	19	65
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	44	21	65
4	Partai Golongan Karya	42	23	65
5	Partai Nasdem	45	20	65
6	Partai Buruh	16	8	23
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	15	10	25
8	Partai Keadilan Sejahtera	45	20	65
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1	0	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat	25	13	38
12	Partai Amanat Nasional	44	21	65
13	Partai Bulan Bintang	33	23	56
14	Partai Demokrat	44	21	65
15	Partai Solidaritas Indonesia	13	7	20
16	Partai Perindo	17	11	28
17	Partai Persatuan Pembangunan	45	20	65
24	Partai Ummat	37	17	54
JUMLAH		557	273	830

u) Rekapitulasi Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kabupaten / Kota se Provinsi Sumbar berdasarkan Partai Politik

NO	PARPOL	JUMLAH CALEG	PERSENTASE
1	Partai Kebangkitan Bangsa	585	99,15 %
2	Partai Gerindra	582	98,64 %
3	PDI Perjuangan	582	98,64 %
4	Partai Golongan Karya	590	100 %
5	Partai Nasdem	587	99,49 %
6	Partai Buruh	126	21,3 %
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	222	37,6 %
8	Partai Keadilan Sejahtera	582	98,64 %
9	Partai Kebangkitan Nusantara	11	1,8 %
10	Partai Hanura	354	60 %
11	Partai Garda Republik Indonesia	66	11,18 %
12	Partai Amanat Nasional	583	98,81 %
13	Partai Bulan Bintang	365	61,86 %
14	Partai Demokrat	574	97,2 %
15	Partai Solidaritas Indonesia	98	16,6 %
16	Partai Perindo	191	32,3 %
17	Partai Persatuan Pembangunan	558	94,5%
18	Partai Ummat	363	61,5 %
JUMLAH		7.019	



- v) Rekapitulasi DCT anggota DPRD Kab/Kota se Provinsi Sumbar berdasarkan Kabupaten dan Kota

NO	KAB/KOTA	DCT			TMS
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	Kab. Pesisir Selatan	371	186	557	1
2	Kab. Solok	265	141	406	3
3	Kab.Sijunjung	248	140	388	1
4	Kab.Tanah Datar	268	143	411	0
5	Kab. Padang Pariaman	305	156	461	1
6	Kab. Agam	361	204	565	2
7	Kab. Lima Puluh Kota	301	158	459	0
8	Kab. Pasaman	242	120	362	0
9	Kab. Kep. Mentawai	171	99	270	0
10	Kab. Dharmasraya	175	86	261	2
11	Kab. Solok Selatan	184	85	269	1
12	Kab. Pasaman Barat	337	161	498	0
13	Kota Padang	432	216	648	0
14	Kota Solok	157	81	238	2
15	Kota Sawahlunto	120	71	191	2
16	Kota Padang Panjang	132	76	208	0
17	Kota Bukit Tinggi	197	113	310	1
18	Kota Payakumbuh	196	96	292	1
19	Kota Pariaman	140	85	225	1
JUMLAH		4.602	2.417	7.019	18

- w) Jumlah Daftar Pemilih Tetap Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L + P
1	2	3	6	7	8
1	Pesisir Selatan	15	189.263	191.359	380.622
2	Solok	14	142.514	144.637	287.151
3	Sijunjung	8	86.420	86.462	172.882
4	Tanah Datar	14	137.985	142.047	280.032
5	Padang Pariaman	17	161.681	164.622	326.303
6	Agam	16	193.255	194.745	388.000
7	Lima Puluh Kota	13	143.841	148.264	292.105
8	Pasaman	12	108.561	110.007	218.568
9	Kep. Mentawai	10	34.262	31.867	66.129
10	Dharmasraya	11	84.064	82.923	166.987
11	Solok Selatan	7	65.179	64.249	129.428
12	Pasaman Barat	11	147.599	148.655	296.254
13	Kota Padang	11	325.912	340.266	666.178
14	Kota Solok	2	27.524	28.308	55.832
15	Kota Sawahlunto	4	24.865	24.574	49.439
16	Kota Pd. Panjang	2	21.424	22.058	43.482
17	Kota Bukit Tinggi	3	46.726	48.342	95.068
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	50.418	52.050	102.468
19	KOTA PARIAMAN	4	35.867	35.811	71.678
JUMLAH		179	2.027.360	2.061.246	4.088.606



6) **Ekonomi**

- a) Kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih relatif baik, terlihat dari cukup stabilnya pertumbuhan ekonomi dan terjaganya inflasi di dalam negeri dimana inflasi sekitar 4,2%, pertumbuhan 5,01%. Kemudian juga dalam situasi lain, ekonomi Indonesia dibanding negara lain, *debt to GDP* ratio sekitar 42%,. Defisit juga tercatat masih di sekitar 4%, transaksi berjalan 0,5%.
- b) Neraca Perdagangan Indonesia selama 26 bulan terakhir terus mencatatkan nilai yang positif bahkan surplus. Indonesia juga masih mempunyai cadangan devisa sebesar US\$135 miliar. Situasi domestik relatif baik. Beberapa negara sudah masuk resesi, namun potensi resesi di Indonesia relatif sangat kecil jika dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 3%.
- c) Stabilitas sistem keuangan Indonesia berada dalam kondisi normal di tengah tekanan eksternal yang meningkat akibat perang Rusia-Ukraina. Pemulihan ekonomi Indonesia tetap terjaga terutama ditopang dengan meredanya atau makin baiknya penanganan *Covid-19* dan diikuti oleh pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat yang kemudian makin mendorong kegiatan perekonomian di dalam negeri.
- d) Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap kuat yang didukung oleh kegiatan konsumsi masyarakat/rumah tangga, kegiatan investasi, serta dukungan belanja pemerintah. Kinerja ekspor yang dalam hal ini mengalami peningkatan sangat signifikan namun tetap harus diwaspadai dengan adanya perkembangan perdagangan ekonomi global dan juga pertumbuhan ekonomi global yang terancam akibat terjadinya perang di Ukraina.
- e) Sejumlah indikator ekonomi masih tercatat baik, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan eceran, *index growth* dari kendaraan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi semen dan konsumsi listrik. Dari sisi eksternal, surplus neraca perdagangan meningkat mencapai USD3,83 Miliar. Hal tersebut juga didukung oleh adanya kenaikan surplus neraca perdagangan non migas terutama dengan meningkatnya harga-harga komoditas global seperti batu bara, besi, baja serta CPO.
- f) Cadangan devisa Indonesia pada Maret 2022 mencapai USD 139,1 Miliar atau setara pembiayaan 7,2 bulan impor atau 7,0 bulan impor dan pembiayaan utang luar negeri Pemerintah. Cadangan devisa ini berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.



- g) Di sisi nilai tukar, nilai tukar Rupiah Indonesia pada triwulan I 2022 tetap terjaga dan hanya mengalami sedikit depresiasi sebesar 0,33% secara rata-rata dibandingkan posisi akhir Tahun 2021. Depresiasi rupiah tersebut lebih rendah dibandingkan mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti Malaysia, India, dan Thailand.
- h) Inflasi hingga Maret 2022 juga tetap terkendali pada tingkat 2,64% *year on year*. Hal ini didukung oleh masih cukup terkendalinya sisi penawaran di dalam merespon kenaikan permintaan, dan juga tetap terkendalinya ekspektasi inflasi, stabilitas nilai tukar Rupiah, serta berbagai respon kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama di dalam menjaga barang-barang yang diatur oleh pemerintah.
- i) Meskipun demikian, sejumlah risiko rambatan yang berasal dari kondisi global akan berpotensi mempengaruhi dari sisi inflasi, *cost of fund*, dan kinerja perekonomian. Oleh karena itu, KSSK tetap mewaspadaikan dan memantau stabilitas sistem keuangan, untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
- j) Krisis multi dimensional, strategi pembangunan nasional khususnya dibidang perekonomian menggunakan strategi stabilitas ekonomi makro sebagai persyarat bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mengingat masih tingginya resiko ketidak pastian perekonomian dunia dan munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan sehingga strategis tersebut sebagai perwujudan *clean goverment dan good governance* belum sepenuhnya berhasil, sebagai Indikator stabilitas ekonomi makro antara lain :
- (1) Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 4,8-5,6% persen, dimana pemerintah akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Angka pertumbuhan tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.
- Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Berbagai sumber pertumbuhan baru harus segera diwujudkan. Pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus dipacu serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global, harus ditingkatkan.
- Dengan semakin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, manajemen kebijakan fiskal dapat lebih



diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing. Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi risiko dan gejolak di masa depan. Bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.

Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak disekitar Rp14.750 per Dolar AS dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 Tahun diprediksi pada level 7,85 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Pemulihan ekonomi Indonesia dalam tren yang terus menguat, sektor-sektor strategis seperti manufaktur dan perdagangan tumbuh secara ekspansif, didukung oleh konsumsi masyarakat yang mulai pulih serta solidnya kinerja ekspor. Sementara neraca perdagangan telah mengalami surplus selama 27 bulan berturut-turut. Sektor manufaktur yang mengalami pemulihan kuat, berperan menopang tingginya kinerja ekspor nasional. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi hilirisasi industri sejak 2015.

Tingginya kinerja ekspor juga didukung oleh sektor pertambangan seiring meningkatnya harga komoditas global.

Pada sektor transportasi dan akomodasi yang paling terdampak pandemi mulai mengalami pemulihan. Masing-masing tumbuh 21,3 persen dan 9,8 persen pada Triwulan II 2022. Pada Juli 2022, Indikator Purchasing Managers' Index (PMI) meningkat menjadi 51,3 persen, mencerminkan arah pemulihan yang semakin kuat.

- k) Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional ditengah perlambatan ekonomi dunia, kebijaksanaan moneter dititik beratkan pada kestabilan tingkat suku bunga dan pengendalian inflasi, namun disatu sisi kebijaksanaan penerbitan suku bunga obligasi, suku bunga nasional (SBN) dari ORI yang tidak disertai pengawasan yang baik, sehingga menguras devisa negara untuk membayar bunga.
- l) Potensi sumber Daya Energi dan mineral pada Tahun 2025 secara nasional diperkirakan akan semakin berkurang disebabkan karena ketersediaan sumber daya energi dan mineral yang semakin berkurang seiring tingginya permintaan pasar internasional disamping lokasi sumber energi dimaksud sangat terbatas dan



sebagian besar berada dalam kawasan hutan lindung yang harus tetap dilestarikan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Dan sebagai solusinya pada Tahun 2023 penggunaan mobil Listrik akan terealisasi walaupun masih dalam tahap pengembangan.

- m) Isu pertambangan mengalami stagnasi dengan tidak adanya investasi baru, karena hambatan-hambatan seperti Isu tumpang tindih lahan tambang dan hutan, lingkungan, otonomi daerah, fiskal, peraturan perundang-undangan yang kurang kondusif, jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar.
- n) Kebijakan industri otomotif kurang memberikan peluang tumbuhnya industri otomotif nasional, sehingga peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia dipenuhi oleh merk asing, munculnya mobil murah dipasaran Indonesia sehingga penerimaan devisa negara berkurang untuk membayar royalti atas lisensi, disamping sebagian besar industri di Indonesia bermasalah terkait dengan pencemaran lingkungan, penegakan hukum masih lemah, sehingga dikhawatirkan kondisi ini akan terus berkelanjutan dan diperkirakan akan berdampak sosial yang luas.
- o) Kebijakan Liberalisme perdagangan menimbulkan beberapa kendala antara lain Meningkatnya tenaga kerja asing di sektor formal dan bidang jasa sehingga mempersempit peluang kerja bagi masyarakat pribumi itu sendiri karena kalah kompetisi/keahlian.
- p) Perdagangan Bebas ASEAN dan CHINA/Asean-China Free Trade Agreement (AC-FTA) mempengaruhi produk dalam negeri, dimana banyaknya produk dari China masuk ke Indonesia bersaing dengan produk dalam negeri khususnya produk jenis mainan anak-anak, elektronik, tekstil dan produk lainnya, dimana produk China harganya lebih terjangkau dengan kualitas baik, sehingga para konsumen cenderung lebih memilih produk asal China sehingga berdampak pada menurunnya omset pedagang khususnya industri kecil produk dalam negeri.
- q) Kenaikan jumlah kendaraan bermotor di Sumbar saat ini mengalami kenaikan yang fantastis (Jumlah Tahun 2023 jumlah: R.2 sebanyak dan R4/6 2.536.33 unit yang mana mengalami kenaikan rata-rata setiap Tahunnya sekitar 0.6 %. sedangkan penambahan jalan setiap Tahunnya relatif stagnan / tidak ada penambahan menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan naiknya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas setiap Tahun khususnya kota - kota besar di Sumbar.



- r) Kebijakan Pemerintah menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) setiap Tahunnya serta akan dihapuskannya subsidi bagi konsumen yang berlangganan 450 s/d 900 KWH terkait dengan makin menipisnya cadangan BBM di dalam negeri serta makin sulitnya bahan alternatif seperti batu bara di Indonesia sebagai bahan dasar pembangkit listrik hal ini diprediksi akan menimbulkan keresahan dan memicu aksi protes /unjuk rasa karena dinilai hal tersebut semakin memberatkan beban hidup masyarakat, selain itu kenaikan tersebut juga akan menambah beban pengusaha pasca kenaikan upah minimum Provinsi yang selalu dituntut oleh para buruh, sehingga dapat memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran karena pengusaha tidak sanggup lagi menjalankan usahanya/bangkrut.
- s) Pembangunan disektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian subur yang tergusur oleh perumahan dan idustrialisasi yang belum diimbangi dengan pengembangan lahan pertanian baru serta upaya modernisasi pertanian belum sepenuhnya mendapat dukungan dari masyarakat petani dan ada kecenderungan petani masih senang dengan sistem tradisional.
- t) Potensi terjadinya illegal logging di Sumbar sangat besar yang berdampak dapat merugikan kekayaan negara, terjadi pengrusakan lingkungan hidup, bencana alam banjir yang merugikan masyarakat etap akan terjadi setiap Tahunnya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebijaksanaan otonomi daerah yang memberikan porsi lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumberdaya alam di daerahnya disalah artikan sebagai kebebasan untuk dapat dimanfaatkan sumber daya alam hutan tanpa memperhatikan peraturan perundang- undangan serta kurangnya rasa tanggung jawab pejabat berwenang pada proses perijinan dalam pemanfaatan sumber daya hutan serta kurangnya pengawasan hutan serta lemahnya penegakan hukum dibidang kehutanan.
- u) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan di sumatera barat belum dimanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan karena kurangnya modal, kurang iptek yang handal, keterbatasan SDM, sarana dan prasarana penunjang lainnya masih jauh dari memadai sehingga para nelayan belum dapat maksimal untuk memanfaatkan potensi laut yang ada.
- v) Keterbatasan pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan lapangan kerja di dalam negeri telah berdampak terhadap animo untuk mencari pekerjaan ke luar negeri secara legal maupun illegal, sehingga tidak sering terjadi permasalahan-



permasalahan yang timbul khususnya pekerja yang bekerja di luar negeri, sedangkan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri belum terimplikasi secara baik/optimal.

- w) Perekonomian Sumatera Barat triwulan II-2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp77,92 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp47,51 triliun.
- x) Ekonomi Sumatera Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan II-2022 tumbuh sebesar 5,14 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 14,12 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,15 persen.
- y) Ekonomi Sumatera Barat triwulan II-2023 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,82 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 12,08 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 38,88 persen.

7) **Sosial Budaya**

- a) Pembangunan kehidupan umat beragama di sumbar telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing- masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan, sehingga muncul gejala fanatisme sempit sehingga cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi agama untuk kepentingan partai politik) atau munculnya aliran/kepercayaan baru yang dinilai sesat dan menyesatkan seperti yang pernah terkajadi di Sumbar antara lain:
 - (1) Ajaran islam Jamaah/LDII.
 - (2) Ajaran islam Darul Arqam.
 - (3) Ajaran Ahmadiyah.
 - (4) Ajaran Agama Bahai, aliran sesat sempalan Syiah.
 - (5) Aliran pelindung kehidupan



- (6) Tauhid Ibrahim
 - (7) BAB Kesucian
-
- b) Kemajemukan adat dan budaya daerah serta keindahan alam merupakan potensi nasional yang mempunyai daya tarik terhadap wisatawan asing untuk berkunjung di sumbar, namun apabila hal tersebut tidak dikelola dengan baik merupakan potensi timbulnya konflik ditengah-tengah masyarakat. Masyarakat Sumatera Barat/Minangkabau yang hidup dilingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan "Adat Basandi sara' dan sara' basandi Kitabullah" yang artinya adat ditopang oleh Sara' (Agama) dan agama ditopang oleh Kitabullah (Al-quran). Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa setiap pola sikap dan pola tindak masyarakat akan selalu diukur dengan kepatutan menurut adat dan agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial di masyarakat sumbar, hal ini disebabkan karena membaurnya pendatang-pendatang dengan penduduk asli suku Minangkabau yang dapat berpotensi timbulnya konflik horizontal maupun vertikal.
 - c) Transformasi budaya dalam proses modernisasi tidak dapat dihindarkan dan cenderung semakin berpengaruh luas pada sistem nilai, norma dan tata laku masyarakat yang dapat menimbulkan gejala krisis identitas, penamaan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber dari kebhinekaan masyarakat telah dilakukan secara berkelanjutan, namun belum mampu menjadi andalan untuk menangkal dan menyaring pengaruh budaya asing.
 - d) Perkembangan masyarakat yang mengarah kepada sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa saat ini antara lain: Individualistis, Materialistis, konsumtif, perilaku anarkis destruktif, merosotnya nilai-nilai budi pekerti, kepedulian sosial, kegotong royongan, persatuan dan kesatuan bangsa, gaya hidup bebas serta menurunnya kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.
 - e) Organisasi masyarakat/LSM, UU keormas sebagai salah satu landasan hak-hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat, apabila pelaksanaannya tidak dilakukan sesuai dengan kaedah hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: persaingan antar ormas yang dapat berujung pada bentrokan fisik antar kelompok/antar organisasi.

f) Pelanggaran.....



- f) Pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) khususnya yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan anak didominasi oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan penerapan Konvensi Hak Anak (KHA) dan undang-undang perlindungan anak belum terealisasi dengan baik, akibatnya kasus kekerasan yang terjadi pada anak seperti Eksploitasi anak untuk bekerja sebagai pengemis, pekerja seks komersial, pelaku kriminalitas jalanan yg dilakukan anak-anak serta kekerasan berupa seksual, fisik dan phisikis yang dilakukan oleh orang tua kandung/tiri, teman, tetangga, guru dan keluarga lainnya cenderung mengalami peningkatan setiap Tahunnya.
- g) Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sumber Daya Alam strategis yang ada di daerah serta pemanfaatannya cenderung mementingkan perekonomian daerah pada jangka pendek serta masih terjadinya pengelolaan sumber daya alam secara illegal (penambangan liar dan kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan) yang dapat mengorbankan kepentingan jangka panjang dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup (pencemaran air, penurunan kondisi hutan, kerusakan DAS, kerusakan habitat ekosistem pesisir laut, ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan terjadinya pemanasan global).
- h) Kasus pertanahan di sumbar pada awalnya hanyalah merupakan persoalan hukum sederhana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan hukum adat setempat, namun dalam perkembangannya permasalahan pertanahan menjadi berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang dapat berdampak luas mengganggu stabilitas nasional, yang penanganannya harus diselesaikan secara komprehensif.
- i) Ketenagakerjaan, Aksi unjuk rasa elemen buruh dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan dengan meminta kenaikan UMP/UMR diprediksi akan terus berlanjut setiap Tahunnya sejalan dengan makin tingginya kebutuhan hidup sehari-hari yang dirasakan oleh masyarakat sehingga gaji buruh tidak seimbang dengan kebutuhan hidup sehari-hari.
- j) Peraturan Menteri Agama RI dan Mendagri No. 08 dan nomor 09 Tahun 2006 Bab.IV pasal 13 dan 14 tentang pendirian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak memiliki izin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat antara yang pro maupun yang kontra, sehingga berakibat rentan terjadinya konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi timbulnya gangguan kamtibmas.
- k) Potensi terjadinya kasus sengketa tanah di Sumatera Barat cukup tinggi dimana penyelesaiannya sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang hal tersebut bila dibiarkan berlarut-larut



berpotensi terhadap terjadinya gangguan kamtibmas berupa pendudukan tanah oleh massa, pencurian hasil kebun milik perusahaan pada saat panen oleh masyarakat, terjadinya pembakaran/pengrusakan aset perusahaan, sampai dengan terjadinya penganiayaan atau pembunuhan.

- l) Adanya organisasi/kelompok garis keras yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kegiatannya senantiasa sering berseberangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang perlu diwaspadai walaupun beberapa organisasi tersebut sudah di bubarkan oleh Pemerintah di antara FPI namun organisasi-organisasi lain yang harus di waspadai Antara lain:
 - (1) Organisasi MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
 - (2) Organisasi HTI (Hizburt Tahir Indonesia).
 - (3) Organisasi KPSI (Komite Penegak Sariah Islam).
 - (4) Organisasi FMPI (Forum Musyawarah Pembela Islam)
 - (5) Organisasi GMM (Gerakan Muslim Minang).
 - (6) Organisasi FMM (Forum Masyarakat Minang Kabau).
 - (7) Organisasi Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara)
 - (8) Presidium Alumni (PA) 212
- m) Maraknya akhir-akhir ini pemberitaan tentang pembentukan negara Khilafah di Indonesia dimana Khilafah Islamiyah merupakan konsep pemerintahan yang pada akhir-akhir ini kembali mengemuka dan menjadi tuntutan sebagian umat Islam. Mengemukanya kembali tuntutan umat Islam atas pelaksanaan dan pengelenggaraan negara yang didasarkan pada syariah Islam tidak bisa dilepaskan dari kegagalan kalangan nasionalis sekuler. Dalam perkembangannya konsep pembentukan negara khilafah islamiyah bertentangan dengan ideologi bangsa indonesia yang mendasarkan pancasila sebagai dasar negara bukan agama yang menjadi dasar negara. Di Sumatera Barat terdapat beberapa daerah yang mempunyai basis Khilafatul Muslimin maupun Negara Islam Indonesia diantaranya Kota Padang, Dharmasraya, Sijunjung, Solok, Bukittinggi, Tanah Datar, Payakumbuh, Lima Puluh Kota.

8) Keamanan.

a) Konflik Sosial

(1) Konflik Horizontal dan Vertikal.

Konflik horizontal dan vertikal dengan latar belakang berbagai permasalahan (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya) bila tidak ditangani secara tepat dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, berbagai penyebab terjadinya gangguan



kamtibmas di Sumbar di Tahun 2022/2023 dilatar belakangi beberapa permasalahan diantaranya adalah:

- (a) Kondisi masyarakat di Sumbar yang majemuk terdiri dari berbagai macam suku, agama dan budaya serta adat istiadat yang cenderung dimunculkan sikap primordialisme/kedaerahan merasa lebih dari yang lain sehingga berpotensi menimbulkan konflik sosial cukup tinggi.
- (b) Tuntutan reformasi terhadap demokrasi, HAM, lingkungan hidup, supremasi hukum dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum (sesuai Undang - undang no.9/1998) dalam pelaksanaannya masyarakat sering melanggar rambu rambu hukum dan melakukan tindakan anarkhis.
- (c) Perbedaan pemahaman dan pelaksanaan ibadah antar dan intra penganut agama serta pendirian tempat ibadah dapat menimbulkan konflik atau protes oleh kelompok agama mayoritas yang dapat berakhir dengan tindakan anarkhis.
- (d) Terjadinya konflik sosial di masyarakat Sumatera Barat mayoritas dipicu tentang permasalahan tanah ulayat yang disengketakan antara ninik mamak satu suku dengan ninik mamak suku lainnya, antara ninik mamak dengan perusahaan, perebutan batas wilayah/area antara kelompok satu dengan kelompok lainnya yang penyelesaiannya tidak tuntas sehingga rentan terjadinya konflik sosial di tengah-tengah masyarakat.
- (e) Selain hal tersebut diatas permasalahan konflik sosial dapat juga disebabkan masalah pergantian gelar datuak (malewa gala), tapal batas tanah antara satu Provinsi dengan Provinsi lainnya, tapal batas antar kabupaten, tapal batas antar nagari, kasus pembagian ganti rugi tanah oleh ninik mamak kepada kemenakannya yang dinilai tidak adil mengakibatkan anak kemenakannya merasa di zholimi sehingga melakukan gugatan balik yang kasusnya rumit dalam penyelesaiannya karena mengarah pada kasus perdata.
- (f) Konflik sosial yang terjadi di Sumatera Barat selama Tahun 2023 juga di picu oleh belum terselesaikannya permasalahan perebutan atau penegalolan Lahan perkebunan, pertambangan dan pertanian oleh masyarakat maupun perusahaan menimbulkan konflik kepemilikan, karena adanya tumpang tindih perizinan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang



berwenang permasalahan tersebut terjadi akibat pembagian hasil perkebunan tersebut belum ada kecocokan antara perusahaan dengan anak nagari tentang luas dan pembagian yang dialokasikan masing - masing pihak.

(2) Data konflik sosial 2023

NO	KESATUAN	PERMASALAHAN							JML	
		POLITIK	EKONOMI	SOSBUD	KAM	SARA	BATAS WIL	LAHAN		SDA
1.	Padang		6	24						30
2.	Bukittinggi			6	1			1		8
3.	Payakumbuh		1	1						2
4.	Pasbar		2	8						10
5.	Solok Kota			2						2
6.	Pariaman			1	1					2
7.	Pasaman			1						1
8.	Pd. Pariaman			3			1			4
9.	Tanah Datar			1						1
10.	Agam			4	2			2		8
11.	Pd. Panjang			1	2					3
12.	Sawahlunto				1					1
13.	Solok			6						6
14.	Pessel		1	14	2			1		18
15.	Dharmasraya			2	2			1		5
16.	Sijunjung									0
17.	50 Kota									0
18.	Solsel				1					1
19.	Mentawai			3						3
JUMLAH			10	77	12	0	1	5	0	105

(3) Data Unjuk Rasa 2023

NO	KESATUAN	BIDANG				JUMLAH
		POLITIK	EKONOMI	SOSBUD	KAM	
1.	Resta Padang	1	12	62	4	79
2.	Resta Bukittinggi			8		8
3.	Res Payakumbuh		1	2		3
4.	Res Pasbar		5	9	2	16
5.	Res Solok Kota		2	1		3
6.	Res Pariaman			3	1	4
7.	Res Pasaman	1		1		2
8.	Res Pd. Pariaman		1	3		4
9.	Res Tanah Datar			1	1	2
10.	Res Agam		5	3		8
11.	Res Pd. Panjang			3		3
12.	Res Sawahlunto					0



13	Res Solok		2	5		7
14	Res Pessel	4	9	3	1	17
15	Res Dharmasraya		6	2	1	9
16	Res Sijunjung					0
17	Res 50 Kota	1		3		4
18	Res Solsel					0
19	Res Mentawai		1			1
JUMLAH		7	44	109	10	170

b) Terorisme

- (1) Kegiatan teroris di Indonesia sampai Tahun 2025 mendatang diperkirakan masih tetap eksis walaupun beberapa pelaku telah tertangkap dan ditembak mati akibat operasi yang dilakukan oleh Densus 88 anti terror, namun jaringan terorisme di Indonesia diperkirakan tidak akan habis dalam waktu beberapa Tahun kedepan.
- (2) Munculnya kelompok garis keras lainnya seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) diberbagai negara dunia termasuk Indonesia yang saat ini kelompok tersebut telah menunjukkan eksistensinya dengan cara melakukan peperangan secara terbuka di Irak dan Suriah serta melakukan propaganda di seluruh dunia melalui media sosial sehingga mampu mempegaruhi masyarakat yang minim akan pengetahuan agama sehingga banyak masyarakat yang ikut bergabung ke ISIS dengan alasan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sekaligus berjihat kejalan allah untuk memerangi kafir sehingga bila meninggal akan masuk surga.
- (3) Doktrinasi yang dilakukan oleh kelompok terorisme dengan cara penanaman fahan-faham radikalisme, anti terhadap pemerintah dan sistem demokratisasi yang dilaksanakan secara langsung ataupun memanfaatkan sarana media massa terutama internet, melakukan rekrutmen terhadap masyarakat yang mudah untuk dipengaruhi terutama masyarakat kalangan ekonomi lemah, masyarakat yang sedang menjalani hukuman dilembaga pemasyarakatan, kalangan masyarakat yang menjadi korban terkait dengan kebijaksanaan pemerintah, masyarakat eks narapidana bahkan sampai dengan kalangan masyarakat terpelajar, serta upaya deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku terorisme masih belum optimal sehingga para pelaku terorisme yang telah selesai menjalani hukuman kembali lagi melakukan kegiatannya, aksi-aksi terorisme kedepan akan tetap eksis di Indonesia.

(4) Perkemban



- (4) Perkembangan terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok teroris saat ini terkait dengan metode dan strategi yang digunakan dapat dikatakan telah mengalami pergeseran terutama dari obyek yang dijadikan sasaran yang semula adalah yang terkait dengan kepentingan asing terutama kepentingan amerika serikat dan sekutunya, untuk saat ini obyek yang dijadikan sasaran adalah aset kepentingan nasional termasuk aparat penegak hukum dalam hal ini TNI, Polri, PNS yang selama ini dianggap sebagai thogut penghambat utama perjuangan kelompok terorisme.
- (5) Kelompok teroris dalam melakukan kegiatan memerlukan sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, sarana perekrutan sampai dengan sarana operasional lainnya seperti dukungan senjata terutama senjata api, bahan peledak yang dapat dirakit menjadi bom serta sarana kebutuhan akomodasi lainnya yang semuanya itu dibutuhkan dukungan pendanaan, sehingga kelompok terorisme akan melakukan kegiatan-kegiatan fa'i dengan cara melakukan kegiatan aksi-aksi kriminal seperti pencurian, perampokan dengan bersenjata.
- (6) Kegiatan terorisme di Sumbar secara umum relatif aman, namun embrio pelaku terorisme telah ditemukan di Sumbar, hal itu dibuktikannya ada beberapa terduga Teroris yang di Tangkap Densus 88 AT Mabes Polri Tahun sepanjang Tahun 2023, antara lain sebagai berikut:
 - (a) Penangkapan dilakukan di Wilkum Polres Tanah Datar sebanyak 1 (satu) orang dengan identitas:
RISKA AYULITA, Padang, 27 Juni 1990 (33 Tahun), Ibu Rumah Tangga, Perum KPN Jorong Saruaso Barat, Kec. Tanjung Emas, Kab. Tanah Datar

Dengan kronologis dan peran:

Pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pukul 12.22 Wib di Jln Sutan Alam Bagagarsyah depan Kantor BPCB Tanah Datar Satgas Densus 88 AT Mabes Polri Wilayah Sumbar telah melakukan penangkapan terhadap Satu orang terkait Dugaan Tindak Pidana Terorisme.

Pada pukul 13.25 Wib s/d 14.13 Wib dilakukan penggeledahan rumah tempat tinggal tersangka dengan BB yang ditemukan:
 - HP 4 unit dalam keadaan rusak
 - 1 (satu) buah Buku catatan
 - 11 (sebelas) buah Kartu Smartfren.



Adapun tersangka (yang diduga terkait jaringan JAD) merupakan jaringan yang beraksi dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan paham Radikal/terorisme serta tutorial untuk membuat senjata api dan bom.

- (b) Eks Napiter yang berada di Wilayah Hukum Polda Sumbar yaitu sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, 17 (tujuh belas) orang berdomisili di Kota Padang, 8 (delapan) orang berdomisili di Kota Payakumbuh, 6 (enam) orang berada di Kabupaten Tanah Datar, 1 (satu) orang berada di kota Padang Panjang, 1 (satu) orang berada di Kota Bukittinggi, 2 (dua) orang berada di Kota Solok, 2 (dua) orang berada di Kab Solok, 1 (satu) orang berada di Kabupaten Solok Selatan, 1 (satu) orang berada di Kab Pasaman, 1 (satu) orang berada di Kab Pesisir Selatan, 3 (tiga) orang berada Kab Agam.
- (c) Dari 44 orang eks napiter tersebut 14 (empat belas) orang diantaranya masih berstatus merah atau masih berpaham radikal dan terorisme yang masih berpotensi melakukan kegiatan dan aksi terorisme dan menjadi ancaman bagi keamanan kamtibmas di wilkum Polda Sumbar.
- c) Lemahnya pengawasan lautan sebagai pintu masuk wilayah Indonesia khususnya Sumbar serta kedekatannya secara geografis dengan australia (salah satu negara yang pemberi suaka) telah dimanfaatkan oleh para sendikat imigran gelap untuk menuju Australia melewati perairan Sumatera Barat (kepulauan Mentawai).
- d) Trend Perkembangan situasi kamtibmas dalam kurun waktu 4 (empat) Tahun terakhir di Wilayah Sumatera Barat dilihat dari jumlah gangguan kamtibmas sampai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
- (1) Data jenis kejahatan Tahun 2020 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	JENIS KEJAHATAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Kej.Konvensional	9.405	5.564	5.124	10.346
2	Kej.Transional	0	0	1.049	1.262
3	Kej.Thdp Kekayaan Nnegara	184	72	74	79
4	Kej.Berinflikasi Kontijensi	0	0	0	7
JUMLAH		9.589	5.636	6.247	11.694



- (2) Data kasus menonjol Tahun 2020 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	KASUS	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1	Curat	1.416	576	685	852
2	Curanmor	902	443	365	248
3	Penipuan	415	257	263	470
4	Curas	176	77	77	65
5	Anirat	322	252	317	1605
6	Perusakan	192	126	82	123
7	Kebakaran/ Pembakaran	67	19	10	16
8	Pembunuhan	20	4	6	15
9	Perjudian	107	121	278	60
10	Narkoba	968	884	1.162	1.207
11	Perkosaan	31	22	19	29
Jumlah		4.616	2.785	3.264	4.690

- (3) Data Laka Lantas Tahun 2018 s/d 2023 (1 Januari- 28 Nov 2023).

NO	TAHUN	JUMLAH	KORBAN			RUGI MATERIIL
			MD	LB	LR	
1	2018	2.561	411	274	3.908	Rp. 7.732.700.000
2	2019	3.336	530	304	4.853	Rp. 6.911.705.000
3	2020	2.554	454	231	3.537	Rp. 7.127.905.000
4	2021	2.412	397	204	3.441	Rp. 8.361.870.000
5	2022	3.305	495	299	4.700	Rp. 9.758.270.000
6	2023	3.328	286	187	3.649	Rp. 9.339.040.000

- (4) Data Langgar Lantas Tahun 2018 s/d 2023

NO	TAHUN	JUMLAH LANGGAR	DENDA
1	2018	70.712	Rp.5.727.112.900
2	2019	99.492	Rp.7.089.478.300
3	2020	129.765	Rp.8.617.652.065
4	2021	73.836	Rp.5.058.142.500
5	2022	63.701	Rp. 4.554.403.700
6	2023	47.173	Rp. 3.129.283.500

- (5) Rangking.....



- (5) Rangkaing Kerawanan daerah gangguan kamtibmas Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	POLRES/TA	JUMLAH KEJAHATAN	RANGKING/ PERINGKAT
1	Polresta Padang	3.645	I
2	Polres Pasaman Barat	1.255	II
3	Polres Pesisir Selatan	899	III
4	Polres Solok Kota	879	IV
5	Polres Padang Pariaman	871	V
6	Polres Payakumbuh	738	VI
7	Polres Damasraya	637	VII
8	Polres Pariaman	560	VIII
9	Polresta Bukit Tinggi	545	IX
10	Polres Lima Puluh Kota	478	X
11	Polres Agam	443	XI
12	Polres Tanah Datar	432	XII
13	Polres Pasaman	397	XIII
14	Polres Padang Panjang	381	XIV
15	Polres Sijunjung	361	XV
16	Polres Solok	335	XVI
17	Polres Solok Selatan	227	XVII
18	Polres Sawahlunto	116	XVIII
19	Polres Kep Mentawai	59	XIX

- e) Tingkat angka kriminalitas setiap Tahunnya di Sumatera barat condong menunjukkan peningkatan secara signifikan baik dilihat dari angka kejadian/kuantitas maupun kualitas khususnya kejahatan konvensional seperti Curat, Curas, Curanmor dan penipuan.
- f) Disamping itu ada beberapa kasus menonjol yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumbar diantaranya penanganan illegal minning, illegal logging, perebutan lahan perkebunan, kasus kriminal (pembunuhan, curat dan curas) yang akan mempengaruhi situasi dan kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sumbar
- g) Meningkatnya keberadaan orang asing di wilayah Sumatera Barat baik sebagai tenaga ahli asing secara legal maupun illegal dapat memicu keresahan masyarakat akibat minimnya lapangan kerja yang tersedia sehingga memunculkan rasa antipati terhadap orang asing yang datang ke Sumbar karena kalah bersaing.
- h) Provinsi Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng australia yang terdapat beberapa retakan/patahan antara lain : retakan/patahan



disepanjang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung serta Letak Geografis Daerah Sumatera Barat dalam jajaran garis Khatulistiwa sangat berpengaruh langsung pada kondisi iklim. Dengan posisi pada Garis Khatulistiwa maka keadaan cuaca secara umum beriklim tropis namun pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Februari s/d Juli merupakan musim kemarau yang rentan terjadinya Karhutla serta pada bulan September s/d Januari merupakan musim penghujan dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga rentan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor maupun angin puting beliung hampir disemua daerah kabupaten/kota. Berikut data bencana alam dan Karhutla selama Tahun 2023.

NO	KESATUAN	LONGSOR	GUNUNG MELETUS	BANJIR	BANJIR BANDANG	ANGIN PUTING	GEMPA BUMI	KARHUTLA	ABRASI	JML
1	PADANG	8		3		7	1			19
2	BUKITTINGGI	6	2	0			1			9
3	PAYAKUMBUH	2		0						2
4	PASBAR	0		2						2
5	SOLOK KOTA	0		0						0
6	PARIAMAN	5		3		5				13
7	PASAMAN	3		2	1	1				7
8	PD.PARIAMAN	3		4		1				8
9	TANAH DATAR	5	6	1				1		13
10	AGAM	12		2		6				20
11	PD. PANJANG	6	4	1		4				15
12	SAWAHLUNTO	2		0						2
13	SOLOK	2		0						2
14	PESEL	6		7		3		8		24
15	DHARMASRAYA	1		5				14		20
16	SIJUNJUNG	1		0		1				2
17	50 KOTA	7		3		2		3		15
18	SOLSEL	2		1						3
19	MENTAWAI	2		2						4
	JUMLAH	73	12	36	1	30	2	26		180

b. Analisis

Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi, khususnya di lingkungan Polda Sumbar. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Itwasda seringkali menghadapi berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Pada kondisi internal terhadap keterbatasan Sumber Daya Manusia adalah kurangnya jumlah personel yang memiliki kompetensi khusus di bidang pengawasan, upaya mengatasi kendala tersebut dilakukan dengan meningkatkan jumlah personel, memperbaiki kualifikasi, dan memberikan motivasi yang memadai. Pada penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori BB dengan nilai (72,85).



Adapun kondisi Kendala Eksternal Itwasda yang dihadapi antara lain, peraturan yang dinamis Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat dan kompleks dapat menyulitkan Itwasda dalam menyesuaikan prosedur kerja, upaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan *sharing knowledge* (tukar pengetahuan), mengikuti pelatihan dan bimtek secara berkala untuk meningkatkan kompetensi personel Itwasda dalam menghadapi kasus yang kompleks. Keterbatasan Akses Informasi seperti informasi penting mungkin bersifat rahasia dan sulit diakses oleh Itwasda Polda Sumbar.

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan keamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan yang akan dihadapi pada Tahun 2025 pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sumber daya manusia Itwasda Polda Sumbar yang memiliki kompetensi di bidang audit dimana Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya mempunyai sertifikat kompetensi audit;
- b. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- c. Para pengguna anggaran/pelaksana kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan pendistribusian anggaran (Rendisgar) masing-masing Satker dan Satwil Polda Sumbar sehingga berdampak terhadap program dan kegiatan serta pencapaian target kinerja dengan output kegiatan menjadi belum optimal;
- d. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat;
- e. Anggaran yang terbatas dapat membatasi ruang lingkup pengawasan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, seperti jumlah kasus yang dapat ditangani dan jenis peralatan yang dapat digunakan.



II. Tujuan dan Sasaran

1. Visi dan Misi

- a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Visi Polda Sumatera Barat
“Terwujudnya Sumatera Barat maju yang aman, tertib dan berkeadilan melalui Kepolisian yang berorientasi pada masyarakat”.
 - 2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat
“Terwujudnya Sumatera Barat maju yang aman, tertib dan berkeadilan melalui penyelenggaraan pengawasan, penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan secara professional”.

- b. Misi Polda Sumatera Barat dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - 1) Misi Polda Sumatera Barat
“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat”.
 - 2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat
 - a) **Menjamin kualitas kinerja dan anggaran Polda Sumbar;**
 - b) **Meningkatkan kapabilitas APIP Polda Sumbar.**

2. Tujuan

- a. Tujuan Polda Sumatera Barat
Adapun tema pembangunan Polda Sumbar Tahun 2025 adalah “Polri siap mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Tujuan:
 - 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat;
 - 2) Menegakkan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara;
 - 3) Mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
 - 4) Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
 - 5) Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.



b. Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Sumbar;
- 2) Menegakkan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara;
- 3) Mewujudkan SDM Polri yang cerdas, profesional dan berintegritas;
- 4) Membangun sarana dan prasarana Polri yang modern sesuai perkembangan teknologi dan dinamika tantangan;
- 5) Mentransformasi Polri menuju organisasi sipil yang rasional, modern, profesional dan akuntabel.

3. Sasaran Prioritas Tahun 2025

a. Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat Tahun 2025

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara prediktif dan proaktif;
- 2) Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif;
- 3) Menegakkan hukum secara adil, tranfaran, legal dan humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI);
- 4) Mewujudkan Pengelolaan SDM yang moderen dan transparan serta pembangunan kapasitas SDM yang sehat, cerdas, berintegrasi dan profesional;
- 5) Mengembangkan almatsus, perbekalan dan fasilitas konstruksi Polri yang modern dan memadai sesuai dengan kebutuhan organisasi berbasis Minimum Essential Police Equipment (MEPE);
- 6) Meningkatkan budaya integritas, akuntabilitas dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

b. Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun 2025

- 1) pengawasan di lingkungan Polda Sumbar yang efektif;
- 2) peningkatan penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) peningkatan Kapabilitas APiP;
- 4) pemenuhan sarana prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pengawasan.



III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2025

1. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Sasaran Prioritas Kesatu: **“Memelihara Kamtibmas di Seluruh wilayah Sumatera Barat secara Prediktif dan Proaktif”**

- 1) arah bijak: meningkatkan kinerja Polri Polda Sumbar dalam melaksanakan deteksi aksi guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mendukung pemeliharaan keamanan wilayah Sumatera Barat.
 - a) meningkatkan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat meliputi deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari fungsi intelijen keamanan Polri melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan, penggalangan dan kontra intelijen yang mampu mendukung operasional fungsi kepolisian baik terhadap potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata serta menurunkan dan mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan konflik sosial di tengah masyarakat;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) penguatan program Polmas guna mengoptimalkan penggelaran satu Bhabinkamtibmas untuk satu desa / kelurahan dalam mendukung Harkamtibmas; (giat3128, 5076, progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 2) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;
 - a) meningkatkan sambang serta optimal dalam melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan dalam memberikan konsultan dalam pemecahan masalah yang terjadi di tengah masyarakat;
(giat3114,3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) melakukan kegiatan pencegahan berupa: kontra radikal, kontra narasi dan kontra ideologi terhadap penyebaran propaganda kelompok terorisme baik pada kanal-kanal media online maupun komunitas masyarakat yang rentan terpapar oleh paham radikalisme dan terorisme; (giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh agama Igaras (Ideologi garis keras) yang telah mengikuti program moderasi beragama, dalam penanganan kasus terorisme;



- (giat3128,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- d) melaksanakan sosialisasi dan kolaborasi dengan "stakeholder" dalam upaya pencegahan paham radikalisme, terorisme dan melaksanakan pembinaan terhadap para eks napi terorisme beserta keluarganya; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (giat3114,progDukma/SP1/SS5/IKPc);
 - f) melaksanakan "edukasi" dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan press release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (giat3070,3149,progDukma/SP1/SS5/IKPg);
 - g) meningkatkan kegiatan Patroli di wilayah rawan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal serta melaksanakan pelacakan dan penangkalan di tempat Obvit / Obvitnas dan destinasi pariwisata; (giat3130,3131,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 3) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan "Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*)" dalam rangka Harkamtibmas guna menciptakan suasana kondusif di tengah masyarakat (*Cooling System*) dengan melibatkan peran aktif dari masyarakat.
- a) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sambang kepada Toda, Toga dan Tomas serta masyarakat lainnya termasuk dari bahaya perjudian, penyelundupan manusia dan barang ilegal; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) peningkatan pemberdayaan pengembalian kewenangan fungsi kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) pembinaan FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan Polmas dan asistensi bagi penguatan KBPPP; (giat3133,5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas kepada masyarakat pengguna jalan; (giat3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

4) arah



- 4) arah bijak: Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
 - a) mengedepankan peran dari para Bhabinkamtibmas dalam melakukan deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) penggelaran pasukan Korbrimob Polri dalam pengamanan konflik dilakukan secara humanis pada titik masalah baik sebelum, saat dan pasca konflik didukung sumber daya manusia yang profesional dan sarpras yang modern; (giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 5) arah bijak: meningkatkan Kamseltibcarlantas bagi masyarakat guna memberikan rasa aman saat terjadi kemacetan dan saat jam rawan kejahatan.
 - a) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli di tengah masyarakat; (giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) meningkatkan kegiatan patroli, penjagaan di wilayah rawan kriminalitas pada saat jam rawan kejahatan serta berperan aktif mengajak masyarakat untuk mewujudkan Kamtibmas; (giat3130,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) meningkatkan kegiatan patroli dan penjagaan di Obvit/Obvitnas dan tempat destinasi pariwisata saat jam-jam rawan dalam rangka mendukung "Pertumbuhan Ekonomi" serta berperan aktif di tengah masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 6) arah bijak: meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa, bencana dan "Slum Area".
 - a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi "ketanggapsegeraan" dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah yang berpotensi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi; (giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) menyelenggarakan dan mendukung pelayanan bantuan penanganan SAR terbatas dalam penanggulangan bencana dan keselamatan yang dilaksanakan oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (giat3130,5081,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);



- c) memetakan Desa/wilayah rawan gempa, bencana dan Banjir oleh "Bhabinkamtibmas" yang wilayah didiami oleh masyarakat guna memudahkan identifikasi masyarakat yang terkena saat dan pascabencana; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan "pelayanan Kesehatan" dan "trauma healling" pada daerah rawan gempa dan bencana;
(giat3072,progDukma;giat3110,progProfesionalismeSDM/SP1/SS3/IKPa/SS5/IKPe);
- 7) arah bijak: melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional/ internasional Tahun 2025.

Penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan intensitas tinggi serta mengoptimalkan penggunaan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat berlangsung event nasional/ internasional berlangsung;

(giat5079,5080,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

- 8) arah bijak: melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan.
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up wilayah rawan konflik;
(giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif;
(giat5076,5087,5080,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan back up pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas;
(giat3130,3131,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba;
(giat5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

9) ar



- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum.
melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "stakeholder" terkait; (giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 10) arah bijak: melaksanakan penggelaran patroli kapal Polri di seluruh wilayah Sumatera Barat guna mendukung kegiatan keamanan laut.
meningkatkan kegiatan patroli kapal Polri dan "back up" di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134,4342,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 11) arah bijak: mendukung kegiatan tahapan pengamanan event nasional/ internasional Tahun 2025.
- a) melaksanakan kegiatan pengamanan nasional/internasional Tahun 2025 meliputi: Pengaturan, Patroli, Penjagaan, Pengawasan; (giat,3130,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
menyelenggarakan pengamanan objek vital dilokasi event; (giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) melaksanakan pengamanan event nasional Tahun 2025 serta mengantisipasi meningkatnya kejahatan yang berskala intensitas tinggi; (giat5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- c) melaksanakan perencanaan operasi kepolisian dalam rangka pengamanan event nasional/internasional Tahun 2025; (giat5079,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah pulau berpenghuni.
- a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut; (giat,3130,5087,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b) melaksanakan dan mengoptimalkan kegiatan patroli, penjagaan dan pelacakan di wilayah rawan kejahatan serta Obvit/Obvitnas serta penguatan Polri di pulau berpenghuni; (giat3130,3131 ,5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);

b. Sasai



- b. Sasaran Prioritas Kedua: **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif Berbasis Digital”**.
- 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TI (Teknologi Informasi).
 - a) peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih menjangkau masyarakat serta pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian; (giat3133,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
mengoptimalkan kegiatan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat3071 /progDukma/SP2/SS1/IKU1);
 - b) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan pulau berpenghuni;
(giat3133,progHarkamtibmas;3071 ,progDukma/SP2/SS4/IKP4b);
 - c) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman website humaspolri.go.id secara berkala;
(giat3149,progDukma/SP2/SS1/IKPg);
 - 2) arah bijak: meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan alur pelayanan, biaya pelayanan dan waktu pelayanan guna meniadakan segala pungutan liar pada sentra pelayanan publik Polri.
 - a) meningkatkan inovasi dan perbaikan pelayanan intelkam dan optimalisasi sistem pelayanan SKCK online;
(giat3112,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKUa);
 - b) melaksanakan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran;
(giat3072,progDukma/SP2/SS5/IKP5e);
 - c) mengoptimalkan proses integrasi Binmas Online System (BOS) V2 dengan Online Single Submission (OSS) dalam penerbitan surat ijin operasional BUJP; (giat5076,progHarkamtibmas/SP2/SS4/IKP4d);
 - 3) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik.
 - a) mengoptimalkan bantuan teknis Satwa dalam melakukan pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
 - b) meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu;
(giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);



- c. Sasaran Prioritas Ketiga: **"Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan,**
- d. **Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)".**
- 1) arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di wilayah perairan Indonesia; (giat3134,4342,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - b) meningkatkan pengungkapan tindak pidana dengan prioritas pada tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), Narkoba, segala bentuk jenis perjudian, penyeludupan, terorisme, lingkungan hidup, siber serta kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
(giat3140,3142,3144,3151,3145,3146,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan perekonomian di bidang pangan, pertanahan, energi, asuransi, investasi, perbankan dan sektor keuangan;
(giat3142,3145,5083,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - d) melaksanakan penindakan terhadap tindak pidana di perairan dalam menciptakan keamanan laut dan perairan Indonesia;
(giat4342,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
 - e) melaksanakan penanganan terhadap tindak pidana di bidang lalu lintas (kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat4343,progSidikLidik/SP3/SS2/IKUb);
 - f) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui "Restorative Justice" yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - g) mengoptimalkan penanganan kejahatan siber (cyber crime) termasuk edukasi masyarakat tentang bahaya kejahatan siber;
(giat3151,progLidikSidik;giat5076,pogHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
 - h) melaksanakan penindakan hukum terbatas/tipiring dalam Harkamtibmas; (giat3130,progHarkamtibmas/SP3/SS2/IKUb);
 - i) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;
(giat3142,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(giat3140,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

2) ε



- 2) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum
 - a) memberikan SP2HP2 kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat; (giat3137,5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi; (giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- e. Sasaran Prioritas Keempat: **"Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional"**.
 - 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi.
 - a) meningkatkan dan melanjutkan pelatihan dalam penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang "Menjunjung Tinggi HAM" dalam rangka pengamanan kegiatan masyarakat dan menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas; (progProfesionalismeSDMpolri;giat5076,3130,5087,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPb);
 - b) meningkatkan kapasitas SDM Polri di bidang Siber dan forensik dalam rangka menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas dan pengamanan event nasional/internasional Tahun 2025; (progProfesionalismeSDMPolri;3151,progLidikSidik/SP4/SS3/IKPb);
 - c) meningkatkan kapasitas personil kedokteran kepolisian guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta personil Polri dan keluarganya; (giat3072,progDukma;/SP4/SS3/IKPb);
 - d) meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mencegah terjadinya korupsi; (giat3068,progDukma/SP4/SS3/IKPb);
 - 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.



- a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE;
(giat5052,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
 - b) meningkatkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital; (giat5053,progDukma SP4/SS5/IKPe);
- 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi.
- a) melanjutkan pemantapan program rekrutmen proaktif secara selektif guna memperoleh anggota Polri yang berkualitas secara terpadu dan berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward);
(progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - d) melaksanakan rekrutmen bagi pegawai negeri pada Polri sesuai kebutuhan organisasi secara Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta mengalokasikan rekrutmen PNS Polri yang mengakomodir kelompok berkebutuhan khusus berbasis teknologi informasi untuk memperoleh calon anggota Polri yang berkualitas berdasarkan kebijakan zero growth, dengan target pemenuhan personel (rekrutmen) Tahun 2025 untuk pendidikan pembentukan Polri meliputi: Akpol, SIPSS, Bintara Polri, Tamtama Polri dan ASN;
(progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - e) melaksanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri untuk meningkatkan kompetensinya Tahun 2025 terdiri dari: Lemhanas, Sespimti, Sespimmen, S-2 KIK-UI, S-3 STIK-PTIK, S-2 STIK-PTIK, S-1 STIK-PTIK, S-2 MSDM-UI, Sespimma, Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Pendidikan Alih Golongan (PAG), Sekolah Bintara Polisi (SBP), Intel LN, UDKP/I PNS, PKN I, PKN II, PKA, PKP, Kermadik Gassus, SPPK, Dikbangpers; (progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - f) melaksanakan seleksi Dikbangum dengan menggunakan penilaian 13 komponen serta membangun sistem penilaian kompetensi personel Polri secara objektif;
(progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);

g. melaksanakan



- g) melaksanakan reformasi pengelolaan SDM secara profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- 4) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kerja sama pendidikan di dalam negeri
 - a) melanjutkan dan melaksanakan rintisan serta perpanjangan MoU kermadiklat Dagri;
(progProfesionalismeSDMPolri//SP4/SS3/IKPa);
 - b) melanjutkan kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam negeri;
(progProfesionalismeSDMPolri;giat3120,prog Harkamtibmas/SP4/SS3/IKPa);
 - c) menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholder, terkait penerimaan dan seleksi pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) di tingkat Polda; (giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- 5) arah bijak: melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja
 - a) melanjutkan penyempurnaan standar penilaian kompetensi serta memberikan kredit/poin dalam penilaian kinerja berdasarkan spesifikasi penugasan dan wilayah serta meningkatkan "sistem reward and punishment" serta sistem reward terhadap kualifikasi personil Polri yang mampu mengaktualisasi diri lebih baik dalam keilmuan dan kehidupan masyarakat;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung "program manajemen talenta";
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP guna menerapkan Merit System dalam manajemen pembinaan karier dalam rangka memberikan kesempatan yang sama dalam berkarya;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- 6) arah bijak: meningkatkan kesejahteraan SDM Polri melalui layanan kesehatan dan keselamatan kerja
 - a) meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada anggota polri dan keluarganya serta pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama bagi anggota Polri dan masyarakat;
(giat3072,progDukma/SP4/SS5/IKPe);



- b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang non diskriminasi dan user friendly;
(giat3072,progDukma;giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);
 - c) meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pegawai bagi anggota Polri, dalam rangka menumbuhkan budaya melayani yang nondiskriminasi dan user friendly termasuk berkaitan dengan Asabri;
(giat3105,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS5/IKPe);
 - d) melanjutkan peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS);
(giat3072,5062,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
- f. Sasaran Prioritas Kelima: **"Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential"**.
- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat.
 - a) melanjutkan pembangunan ruang RPK, SPKT di Polda, Polres dan Polsek sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terintegrasi secara online;
(giat3071,progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKpb);
 - b) melanjutkan pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
(giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKpb);
 - c) melanjutkan pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi serta melanjutkan pembangunan gedung BPKB prototipe dan gedung Satpas prototipe;
(giat3071,progDukma;giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/SP5/SS4/IKpb);
 - d) Melanjutkan pembangunan dan pengembangan Indonesia Safety Driving Center;
(giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKpb);



- e) melanjutkan pembangunan dan pengembangan RTMC/TMC; (giat3133,progHarkamtibmas;giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - f) melanjutkan pembangunan/pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara transparan dan modern di jalan raya; (giat3133,progHarkamtibmas;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - g) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri; (giat5060,5062/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - h) melaksanakan Litbang pembuatan prototype peralatan Polri berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini; (giat3071,progDukma;prog3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - i) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi di Pulau Terluar dan wilayah rawan bencana; (progDukma;giat3084,5060,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - j) Melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri terkini (MEPE); (giat5060,5061,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - k) pemenuhan peralatan penanganan awal bencana, Karhutla dan banjir sesuai dengan karakteristik wilayah dalam rangka pertolongan pertama kepada masyarakat; (giat3084,5060,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - l) pemenuhan kendaraan listrik guna mendukung program pemerintah di bidang energi terbaru; (giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - m) pemenuhan almatsus/alpalkam untuk digunakan dalam pengamanan event nasional/internasional Tahun 2025, pengamanan Perbatasan dan Destinasi Wisata; (giat3084,progModernisasiSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 2) arah bijak: pemenuhan rumah dinas anggota Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran di seluruh wilayah termasuk di wilayah terluar di Sumatera Barat.
- a) melanjutkan pembangunan fasilitas perkantoran, pergudangan, rumah dinas, flat dan rusun bagi personel Polri di seluruh wilayah termasuk di wilayah terluar di Sumatera Barat (Pembangunan Gedung Pelayanan BPKB Ditlantas Polda Sumbar, Lift Mako Polda Sumbar, Gedung Satlantas Polres Padang Pariaman, Rumdin Polsek Talamau Polres Pasaman Barat, Polsek Sungai Lasi Polres Solok.



Polsek 2x11 Enam Lingkung Polres Padang Pariaman dan Polsek VII Koto Sungai Sariak Polres Padang Pariaman);
(giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb)

- b) melanjutkan pembangunan dan meningkatkan Faskes (Rumah sakit, poliklinik, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya) dalam rangka memberikan layanan kesehatan yang prima kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya serta guna mendukung "Reformasi Sistem Kesehatan Nasional"; giat5060,5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- 3) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan Almatsus Scientific Criminal Investigation (SCI).
 - a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan pemenuhan peralatan laboratorium forensik dengan teknologi terkini; (giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sarana prasarana indentifikasi kepolisian terkini guna mendukung pengungkapan kasus tindak pidana serta pelayanan publik kepolisian; (giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - 4) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem teknologi informatika kepolisian yang terintegrasi.
 - a) melanjutkan pembangunan dan pengembangan sistem teknologi komunikasi dan informatika kepolisian modern yang terintegrasi secara bertahap; (giat3071,ProgDukma;giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat; (progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
 - c) mengembangkan teknologi komunikasi dan informatika kepolisian berdasarkan hasil penelitian; (giat3084,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri;progDukma/SP5/SS4/IKPb);
- g. Sasaran Prioritas Keenam: "**Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian**".
1. arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online.
 - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat; (giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);

- b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
2. arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri.
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi;
(giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mendorong pelayanan publik secara online yang bersih transparan dan akuntabel berbasis Medsos/Whatsapp;
(giat3091,3149,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk pungli;
(giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "operasi bersih" terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
3. arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri.
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi Whistle Blower System (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi;
(giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);



- b) melanjutkan sosialisasi "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017" tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
4. arah bijak: meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel.
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri; (giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPF);
 - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polri dalam e-Jakstra dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri; (giat5051,progDukma/SP6/SS5/IKPF);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker; (giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPF);
 - d) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional; (giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPF);
 5. arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien.
 - a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Polda Sumbang dan satuan kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru; (giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - c) memberi masukan terkait dengan perubahan peraturan kepolisian tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor;(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);



6. arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih predikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.
- a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd);
 - c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI);
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd).

2. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2025, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Sasaran Prioritas Kesatu: **“Memelihara Kamtibmas di Seluruh wilayah Sumatera Barat secara Prediktif dan Proaktif”**
 - 1) arah bijak: menurunkan ancaman gangguan Kamtibmas dan potensi kejahatan melalui kegiatan pencegahan yang proaktif;



- e) menetralsir informasi negatif di tengah masyarakat yang dapat mengganggu Kamtibmas dengan mengelola opini publik guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; (giat3114,progDukma/SP1/SS5/IKPc);
 - f) melaksanakan "edukasi" dan imbauan kepada masyarakat berupa pesan Kamtibmas untuk pencegahan kejahatan termasuk bahaya perjudian, TPPO dan penyelundupan barang ilegal melalui produksi konten kreatif, melaksanakan press release tentang Kamtibmas dengan tujuan meningkatkan citra positif terhadap Polri; (giat3070,3149,progDukma/SP1/SS5/IKPg);
- 4) arah bijak: Mengedepankan penanganan konflik secara humanis;
- b) mengorganisasikan kegiatan masyarakat untuk mengalihkan potensi konflik sosial/politik dengan melakukan aktivitas/kegiatan yang positif; (giat5076,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 8) arah bijak: melaksanakan "back up" kewilayahan untuk pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial dan menjalin sinergisitas dengan stakeholder terkait penanganan gangguan keamanan.
- a) mengoordinasikan kesiapan personel Polri agar mampu digerakkan secara cepat dalam rangka back up wilayah rawan konflik; (giat3130,5076,5087,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - b) membangun kerja sama dan sinergisitas dengan satuan kewilayahan serta para pemangku kepentingan (stakeholder) secara aktif guna mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban dalam negeri yang kondusif; (giat5076,5087,5080,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - c) melaksanakan *back up* pengamanan kegiatan di tengah masyarakat yang sedang beraktivitas; (giat3130,3131,3133,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - d) melaksanakan back up kegiatan pengamanan di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (giat3131,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
 - e) melaksanakan kegiatan back up pelayanan pelacakan dan penangkalan di daerah rawan kejahatan dan bahaya Narkoba; (giat5081,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- 9) arah bijak: meningkatkan kerja sama Kepolisian dalam negeri guna mendukung Harkamtibmas dan Gakkum.
- melaksanakan kerja sama dalam negeri antara Polri dan Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi dengan "stakeholder" terkait; (giat3120,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);



- 12) arah bijak: meningkatkan penguatan Polri dalam pengamanan di wilayah pulau berpenghuni.
 - a) membangun kolaborasi operasional Polri bersama K/L terkait dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (pre-emptif, preventif dan melakukan penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut; (giat,3130,5087,3134,progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKUa);
- b. Sasaran Prioritas Kedua: **“Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Polri yang semakin Inovatif Berbasis Digital”**.
 - 1) arah bijak: mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia pada sentra pelayanan publik Polri yang berbasis TI (Teknologi Informasi).
 - c) melakukan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan pulau berpenghuni; (giat3133,progHarkamtibmas;3071 ,progDukma/SP2/SS4/IKP4b);
 - d) melakukan update informasi dan dokumentasi pada layanan/ laman website humaspolri.go.id secara berkala; (giat3149,progDukma/SP2/SS1/IKPg);
 - 4) arah bijak: mengoptimalkan pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi serta audit terhadap pelayanan publik.
 - c. meningkatkan pembinaan teknis (supervisi, asistensi dan verifikasi) dan audit terhadap sistem manajemen pengamanan objek vital nasional serta objek vital tertentu; (giat3130,3131,progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1);
- c. Sasaran Prioritas Ketiga: **“Menegakkan Hukum secara Adil, Transparan, Legal, dan Humanis berdasarkan Scientific Criminal Investigation (SCI)”**.
 - 1) arah bijak: mengedepankan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
 - f) mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui “Restorative Justice” yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun juga pada aspek kemanfaatan dan keadilan; (giat3142,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);

i) mempercepat



- i) mempercepat penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;
(giat3142,3144,3145,3146,3151,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
 - j) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam rangka pengolahan TKP dan pemeriksaan Barang Bukti;
(giat3140,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUb);
- 2) arah bijak: mewujudkan proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum
- a) memberikan SP2HP2 kepada pihak pelapor baik diminta ataupun tidak diminta sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyidikan serta sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
(giat3137,5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - b) mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan dan penyelidikan baik melalui pengawasan melekat atasan penyidik maupun peran dari Wassidik guna memastikan proses penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
 - c) mengoptimalkan penggunaan e-MP (e-manajemen penyidikan) sebagai sarana pengawasan penyidikan perkara dan transparansi;
(giat5086,progLidikSidik/SP3/SS2/IKUa);
- d. Sasaran Prioritas Keempat: **"Mewujudkan Pengelolaan SDM yang Modern dan Transparan serta Pembangunan Kapasitas SDM yang Sehat, Cerdas, Berintegritas dan Profesional"**.
- 1) arah bijak: meningkatkan kualitas hasil lulusan pendidikan Diklat Polri guna mewujudkan SDM Polri yang siap pakai di era digital dan kemajuan teknologi.
 - d) Meningkatkan kualitas dan kapabilitas para Verifikator dan APIP dilingkungan Polri dalam upaya tertib administrasi keuangan serta mencegah terjadinya korupsi;
(giat3068,progDukma/SP4/SS3/IKPb);
 - 2) arah bijak: mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik di lingkungan Polri yang modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
 - a) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Polri antara lain melalui optimalisasi penggunaan SPBE;
(giat5052,progDukma/SP4/SS5/IKPe);
 - b) meningkatkan pelayanan publik Polri yang berkualitas dan terpercaya berbasis digital; (giat5053,progDukma SP4/SS5/IKPe);
 - 3) arah bijak: meningkatkan kualitas SDM Polri yang unggul dan humanis di era digital dan kemajuan teknologi.



- b) melanjutkan persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif melalui program manajemen talenta;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
 - c) mempersiapkan kader pimpinan Polri melalui pembinaan karier yang berbasis meritokrasi, bersih dan bebas dari praktik KKN;
(giat3108,progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKPa);
- e. Sasaran Prioritas Kelima: **"Mengembangkan Almatsus, Perbekalan dan Fasilitas Konstruksi Polri yang Modern dan Memadai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi Berbasis Minimum Essential"**.
- 1) arah bijak: memenuhi sarana dan prasarana serta Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik Polri kepada masyarakat.
 - b) melanjutkan pemenuhan almatsus Polri yang modern berbasis teknologi informasi guna mendukung penggelaran operasional dalam rangka penanganan penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa, penanganan konflik sosial, lawan insurjensi dan pemeliharaan keamanan;
 - 4) arah bijak: melanjutkan pembangunan dan pengembangan serta menyatukan sistem teknologi informatika kepolisian yang terintegrasi.
 - c) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian secara bertahap dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat;
(progDukma;giat5062,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/SP5/SS4/IKPb);
- f. Sasaran Prioritas Keenam: **"Meningkatkan Budaya Integritas, Akuntabilitas dan Kehormatan pada Setiap Pelaksanaan Tugas Kepolisian"**.
- 1) arah bijak: melanjutkan penguatan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online.
 - a) mengoptimalkan penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu guna meningkatkan kepercayaan masyarakat;
(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online; (giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) meningkatkan percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat3089,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);

2) arah



- 2) arah bijak: mengoptimalkan kegiatan Saber Pungli, pencegahan bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal di lingkungan internal Polri.
- a) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas dari Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas Pungli serta pelaporan yang terintegrasi; (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - b) mendorong pelayanan publik secara online yang bersih transparan dan akuntabel berbasis Medsos/Whatsapp; (giat3091,3149,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - c) mengoptimalkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah Pungli, bahaya perjudian dan TPPO serta penyelundupan barang ilegal; (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - d) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan, personel, Baket) terkait rekrutmen dan pelaksanaan proses pendidikan pembentukan: Bintara, Akpol dan SIPSS dari segala bentuk pungli; (giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - e) melanjutkan pelaksanaan pengamanan (kegiatan personel, Baket) terkait seleksi dan pelaksanaan proses Pendidikan Pengembangan: SIP, Sespima, Sespimmen/PKN Tingkat 2, Sespimti/Lemhanas dan PKN Tingkat 1 dari segala bentuk pungli; (giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
 - f) melanjutkan pelaksanaan kegiatan "operasi bersih" terkait penanganan perkara pidana, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi pada pelayanan publik kepolisian (SIM, STNK,BPKB, SKCK); (giat3089,3090,progDukma/SP6/SS5/IKPg);
- 3) arah bijak: melanjutkan dan meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri.
- a) meningkatkan peran serta seluruh anggota sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait dugaan korupsi di tubuh Polri melalui Aplikasi Whistle Blower System (WBS). Sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum lainnya dalam upaya pencegahan korupsi; (giat3089,3090,3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan sosialisasi "Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017" tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (giat3091,progDukma/SP6/SS5/IKPd);



- 4) arah bijak: meningkatkan pelaksanaan tata kelola manajemen kinerja, perencanaan, penganggaran dan keuangan Polri yang transparan dan akuntabel.
 - a) meningkatkan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan, penganggaran, dan kinerja Satker agar lebih efektif dan efisien guna meningkatkan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri;
(giat3068,3091,4339,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - b) melanjutkan dan meningkatkan sinergisitas penginputan kebutuhan Polri dalam e-Jakstra dalam penyusunan produk perencanaan dan penganggaran Polri yang berkualitas guna menyelaraskan pembangunan di lingkungan Polri;
(giat5051,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tata kelola keuangan tingkat Satker;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
 - d) melaksanakan analisis, monitoring dan evaluasi kinerja dan penggunaan anggaran di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3068,3091,4339,5054,progDukma/SP6/SS5/IKPf);
- 5) arah bijak: melanjutkan penataan kelembagaan dan tata laksana Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar lebih efektif dan efisien.
 - a) melanjutkan pelaksanaan Monev pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap; (giat4339,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - b) melanjutkan penguatan organisasi pada tingkat Polda Sumbar dan satuan kewilayahan sesuai dengan dinamika perkembangan situasi Kamtibmas dan daerah otonomi baru;
(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - c) memberi masukan terkait dengan perubahan peraturan kepolisian tentang SOTK tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor;(giat5052,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- 6) arah bijak: meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri guna meraih predikat WBK dan WBBM serta meningkatkan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM.
 - a) melaksanakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan



- penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
- b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/ Polrestabes, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053,progDukmaSP6/SS5/IKPd);
 - c) melaksanakan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi aktif dalam pembinaan keberlanjutan dan replika inovasi pelayanan publik (PKRI); (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);
 - d) melanjutkan, mempertahankan dan meningkatkan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053,progDukma/SP6/SS5/IKPd);

IV. Program, kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2025

1. Program dan Kegiatan

a. Program BP Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri khususnya pada Itwasda Polda Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional;

2) Kegiatan:

Dukungan manajemen dan teknis sarpras.

b. Program WA Dukungan Manajemen.

1) Tujuan:

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sektor.



2) Kegiatan:

- a) Pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- c) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- d) Pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran Polri.

2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025.

Alokasi pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2025 sebesar **Rp. 6.425.558.000,-** (Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras sebesar Rp. 109.162.000,- (Seratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah);
- b. Program dukungan manajemen Rp. 6.316.396.000,- (Enam Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Sebesar Rp. 5.307.291.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan sebesar Rp. 1,009,105,000,- (Satu Miliar Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Rupiah).

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2025.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 29 November 2024

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR

Ditandatangani secara elektronik oleh:

PRABOWO SANTOSO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70012122



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ 44 /XI/REN.2.3./2024 TANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

RKT

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ 44 /XI/REN.2.3./2024 TANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH**



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

RKA - KL

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/ 44 /XI/REN.2.3./2024 TANGGAL 29 NOVEMBER 2024**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BP 5059 5059.EBA	Program Modernisasi Alamsus dan Sarana Prasarana Polri Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			109,162,000 109,162,000 109,162,000	
5059.EBA.994 002 MH	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Perkantoran Operasional dan Pemeliharaan Kantor PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10	1.0 Layanan		109,162,000 109,162,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 4	7.0 UNIT	12,400,000	86,800,000	RM
523121	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Kendaraan Roda 2	4.0 UNIT	2,250,000	9,000,000 9,000,000	RM
523121	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang) - Pemeliharaan Personel Komputer - Pemeliharaan Printer - Mesin Foto Copy	6.0 UNIT 15.0 UNIT 1.0 UNIT	730,000 556,000 642,000	13,362,000 13,362,000 4,380,000 8,340,000 642,000	RM
060.01.WA 3073 3073.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			6,316,396,000 5,307,291,000 5,307,291,000	
3073.EBA.962 003 BI	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Umum Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER	1.0 Layanan		646,022,000 646,022,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang) - Duk Giat Bimtek Fungsi Pengawasan	1.0 Giat	8,588,000	12,188,000 8,588,000	RM
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.010-Padang) - Biaya narasumber/pemapar [4 ORG x 1 GIAT x 1 JAM]	4.0 OJ	900,000	3,600,000	RM
D	HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN			29,904,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.010-Padang)			29,904,000	RM
	- Honor Operator SIRENA dan E-monev [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,512,000	18,144,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
<i>JF</i>	<i>DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER</i>			<i>209,795,000</i>	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			106,340,000	RM
	- DUK GIAT (TAKLIMAT AWAL DAN AKHIR AUDIT KINERJA) [6 GIAT]	6.0 GIAT	3,200,000	19,200,000	
	- DUK GIAT [1 GIAT]	1.0 GIAT	80,000,000	80,000,000	
	- Snack/Kudapan Taklimat Awal dan Akhir Audit Kinerja [70 ORG x 6 GIAT x 1 HARI]	420.0 OG	17,000	7,140,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang)			103,455,000	RM
	- Uang Harian (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [5 ORG x 19 GIAT x 2 HARI]	190.0 OH	304,500	57,855,000	
	- Penginapan (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT FUNGSI PENGAWASAN) [5 ORG x 19 GIAT x 1 MALAM]	95.0 OH	480,000	45,600,000	
<i>KG</i>	<i>RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI</i>			<i>367,627,000</i>	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			208,461,000	RM
	- Snack/Kudapan Rakernis Fungsi Pengawasan [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	135.0 OK	17,000	2,295,000	
	- Makan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	108.0 OK	25,000	2,700,000	
	- Snack/Kudapan Konsultasi/Koordinasi bersama Instansi terkait [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	108.0 OK	17,000	1,836,000	
	- Duk Giat (PENINGKATAN KAPABILITAS APIP)	2.0 Giat	100,815,000	201,630,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.010-Padang)			159,166,000	RM
	- Penginapan (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT PERJALANAN ITWASDA) [5 ORG x 2 GIAT x 1 MALAM]	10.0 OH	406,600	4,066,000	
	- Uang Harian (JALDIS DALAM RANGKA DUK GIAT PERJALANAN ITWASDA) [5 ORG x 2 GIAT x 2 HARI]	20.0 OH	380,000	7,600,000	
	- Biaya Transportasi (JALDIS KE JAKARTA DALAM RANGKA GIAT RAKORWAS/RAKOR ANEV/PELATIHAN/SUN LAPKEU) [5 ORG x 5 GIAT]	25.0 OG	4,000,000	100,000,000	
	- Uang Harian (JALDIS KE JAKARTA DALAM - RANGKA GIAT RAKORWAS/RAKOR ANEV/PELATIHAN/SUN LAPKEU) [5 ORG x 5 GIAT x 3 HARI]	75.0 OH	500,000	37,500,000	
	- Akomodasi/ Penginapan (JALDIS KE JAKARTA DALAM - RANGKA GIAT RAKORWAS/RAKOR ANEV/PELATIHAN/SUN LAPKEU) [1 ORG x 5 GIAT x 1 HARI]	5.0 OH	2,000,000	10,000,000	
<i>KI</i>	<i>SOSIALISASI</i>			<i>1,360,000</i>	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			1,360,000	
	- Snack/Kudapan Sosialisasi DIPA RKA-K/L [40 ORG x 1 GIAT x 2 KALI]	80.0 OK	17,000	1,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KN	EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN			21,524,000	
521211	Belanja Bahan			21,524,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Snack/Kudapan Reviu LKIP Polda [8 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI]	16.0 OK	17,000	272,000	
	- KERTAS A4 (REVIU LKIP POLDA) [6 RIM x 1 KALI]	6.0 RIM	52,000	312,000	
	- TINTA (REVIU LKIP POLDA) [2 BTL x 1 KALI]	2.0 BTL	80,000	160,000	
	- Spanduk (EVALUASI/PENILAIAN SAKIP) [1 BUAH x 1 GIAT]	1.0 LMBR	300,000	300,000	
	- Snack/Kudapan Evaluasi/Penilaian SAKIP [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	114.0 OK	17,000	1,938,000	
	- Snack/Kudapan Reviu/Revisi RKA-K/L [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	114.0 OK	17,000	1,938,000	
	- DUK GIAT REVIU LAPKEU [1 GIAT]	1.0 GIAT	1,814,000	1,814,000	
	- Snack/Kudapan Reviu Laporan Keuangan [145 ORG x 2 GIAT x 3 HARI x 1 KALI]	870.0 OK	17,000	14,790,000	
KQ	PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN RENCANA KERJA			782,000	
521211	Belanja Bahan			782,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [4 RIM x 1 KALI]	4.0 RIM	52,000	208,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 BTL x 1 KALI]	2.0 BTL	80,000	160,000	
	- JILID (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [10 BUKU x 1 KALI]	10.0 BTL	30,000	300,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN RENCANA KERJA) [2 PACK x 1 KALI]	2.0 PACK	57,000	114,000	
KR	PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA			2,016,000	
521211	Belanja Bahan			2,016,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [4 RIM x 4 KALI]	16.0 RIM	52,000	832,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 BTL x 4 KALI]	8.0 BTL	80,000	640,000	
	- MAP BIOLA (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [1 PACK x 4 KALI]	4.0 PACK	57,000	228,000	
	- PULPEN (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [2 KOTAK x 4 KALI]	8.0 KOTAK	23,000	184,000	
	- MATERAI (PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG) [11 BUAH]	11.0 BH	12,000	132,000	
KS	PENYUSUNAN EVALUASI LKIP			826,000	
521211	Belanja Bahan			826,000	RM
	(KPPN.010-Padang)				
	- Snack/Kudapan Penyusunan Evaluasi LKIP Polda [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI]	10.0 OK	17,000	170,000	
	- KERTAS A4 (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID (PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA) [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	
3073.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,661,269,000	
001	Gaji dan Tunjangan			4,601,249,000	U

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<u>PEMBAYARAN GAJI, LEMBUR, HONORARIUM DAN VAKASI</u>			4,601,249,000	
511161	<u>Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			387,001,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	346,409,000	346,409,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
511169	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			6,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511171	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			15,839,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	13,991,880	13,991,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	924,000	924,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	924,000	924,000	
511172	<u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			7,890,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	6,808,000	6,808,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	541,000	541,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	541,000	541,000	
511173	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			35,700,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1.0 THN	30,600,000	30,600,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
511175	<u>Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,105,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,779,000	1,779,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	163,000	163,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	163,000	163,000	
511176	<u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			17,236,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	17,236,000	17,236,000	
511179	<u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			71,749,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	71,749,000	71,749,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511193	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			10,650,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	10,290,000	10,290,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	180,000	180,000	
511211	<u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			2,177,455,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,929,649,000	1,929,649,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
511219	<u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			28,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	24,000	24,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			130,486,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	115,360,000	115,360,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
511222	<u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			46,768,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	41,830,000	41,830,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
511223	<u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			300,740,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	266,910,000	266,910,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			30,384,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	1.0 THN	26,758,000	26,758,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
511226	<u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			136,672,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI	1.0 THN	136,672,000	136,672,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511228	Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI (KPPN.010-Padang)			1,067,640,000	RM
	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	1,067,640,000	1,067,640,000	
511232	Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (KPPN.010-Padang)			7,800,000	RM
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	1.0 THN	7,000,000	7,000,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	400,000	400,000	
511244	Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (KPPN.010-Padang)			19,800,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	17,850,000	17,850,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	975,000	975,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	975,000	975,000	
512211	Belanja Uang Lembur (KPPN.010-Padang)			135,300,000	RM
	- Golongan II (UANG LEMBUR) [1 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	264.0 OJ	24,000	6,336,000	
	- Golongan III (UANG LEMBUR) [6 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	1584.0 OJ	30,000	47,520,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN LEMBUR) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	35,000	4,620,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN LEMBUR) [6 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	792.0 OH	37,000	29,304,000	
	- Golongan II (UANG MAKAN KERJA LEMBUR) [7 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	924.0 OH	35,000	32,340,000	
	- Golongan III (UANG MAKAN KERJA LEMBUR) [2 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	264.0 OH	37,000	9,768,000	
	- Golongan IV (UANG MAKAN KERJA LEMBUR) [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	41,000	5,412,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			60,020,000	
OC	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR			60,020,000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.010-Padang)			60,020,000	RM
	- Bekal kantor	40.0 OT	1,500,500	60,020,000	
3091	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan			1,009,105,000	
3091.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	79.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		1,009,105,000	
3091.EBD.965	Lokasi : KOTA PADANG Layanan Audit Internal	79.0 Dokumen		1,009,105,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN			1,009,105,000	
D				42,528,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP	
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			42,528,000	RM	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,036,000	12,432,000		
	- Honor Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	540,000	6,480,000		
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	516,000	6,192,000		
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [3 ORG x 12 BLN]	36.0 OB	384,000	13,824,000		
	- Honor Operator Persediaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000		
	- Honor Operator Aset [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000		
HY	PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN			852,487,000		
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			3,955,000	RM	
	- PULPEN (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	4.0 KOTAK	47,000	188,000		
	- PULPEN BOLINER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	1.0 KOTAK	170,000	170,000		
	- PENSIL 2B (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	5.0 KOTAK	45,000	225,000		
	- TINTA PRINTER (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	11.0 BTL	80,000	880,000		
	- KERTAS A4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	10.0 RIM	52,000	520,000		
	- CETAK BUKU KERTAS KERJA (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	35.0 BUKU	26,000	910,000		
	- JILID (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN)	30.0 BUKU	30,000	900,000		
	- KERTAS F4 (ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN) [3 RIM]	3.0 RIM	54,000	162,000		
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			775,032,000		RM
	- Penginapan Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	654,000	141,264,000		
	- Uang Harian Pamen (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	332,000	143,424,000		
	- Penginapan Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	420,000	90,720,000		
	- Uang Harian Pama (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	332,000	143,424,000		
	- Penginapan Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM	216.0 OH	411,000	88,776,000		
	- Uang Harian Bintara (BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN PENGAWASAN) [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI	432.0 OH	332,000	143,424,000		
	- Duk Transportasi Laut/Kapal pemeriksaan dan pengawasan [4 ORG x 10 GIAT x 1 RES]	40.0 OG	600,000	24,000,000		
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.010-Padang)			73,500,000	RM	
	- Uang harian pemeriksaan dan pengawasan [5 ORG x 7 GIAT x 14 STKR x 1 HARI	490.0 HARI	150,000	73,500,000		
VJ	KEGIATAN 1 PRIORITAS POLRI			114,090,000		

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 6,425,558,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			14,040,000	RM
	- Snack (RAPAT PENANGANAN DUMAS TERPADU) [10 Orang x 1 Kali x 12 Bulan]	120.0 OK	17,000	2,040,000	
	- Investigasi Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 Kali]	12.0 OK	500,000	6,000,000	
	- Rapat Penanganan Dumas Terpadu (ATK) [1 GIAT x 12 GIAT]	12.0 Giat	500,000	6,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			98,550,000	RM
	- Uang Harian [6 Orang x 30 Hari]	180.0 OH	340,000	61,200,000	
	- Penginapan [6 Orang x 20 Malam]	120.0 OH	311,250	37,350,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.010-Padang)			1,500,000	RM
	- Uang Harian [5 Orang x 2 Hari]	10.0 OH	150,000	1,500,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

PADANG, 18 November 2024